



**PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN
UNTUK Mendukung KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

**CHOIRUL ANAM, S.E.
KOLONEL INF NRP 11940025211072**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN UNTUK Mendukung KETAHANAN NASIONAL”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: Kep. 10 Tahun 2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tutor Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 Lemhannas RI dan Kep. 40 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 Lemhannas RI.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Bapak Drs. H. Edijan Tandjung, M.Si. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, Kementerian Keuangan, dan BAIS TNI termasuk bagi siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas tentang peran diplomasi pertahanan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juni 2020
Penulis

Choirul Anam, S.E.
Kolonel Inf Nrp 11940025211072



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Choirul Anam, S.E.

Pangkat : Kolonel Inf Nrp 11940025211072

Jabatan : Paban Utama A-5 DIT A BAIS TNI

Instansi : BAIS TNI

Alamat : Kalibata, Jakarta Selatan.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.



Choirul Anam, S.E.
Kolonel Inf Nrp 11940025211072

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan terkait	10
9. Kerangka Teoritis	12
10. Data dan Fakta	15
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	18
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	27
13. Dinamika Ancaman Lingkungan Strategis	28
14. Kerangka Kemitraan Strategis Diplomasi Pertahanan Indonesia	37
15. Sinergi Antar Institusi Dalam Mengawal Diplomasi Pertahanan.....	46

16. Perencanaan Kebijakan Nasional di Bidang Diplomasi Pertahanan	51
--	----

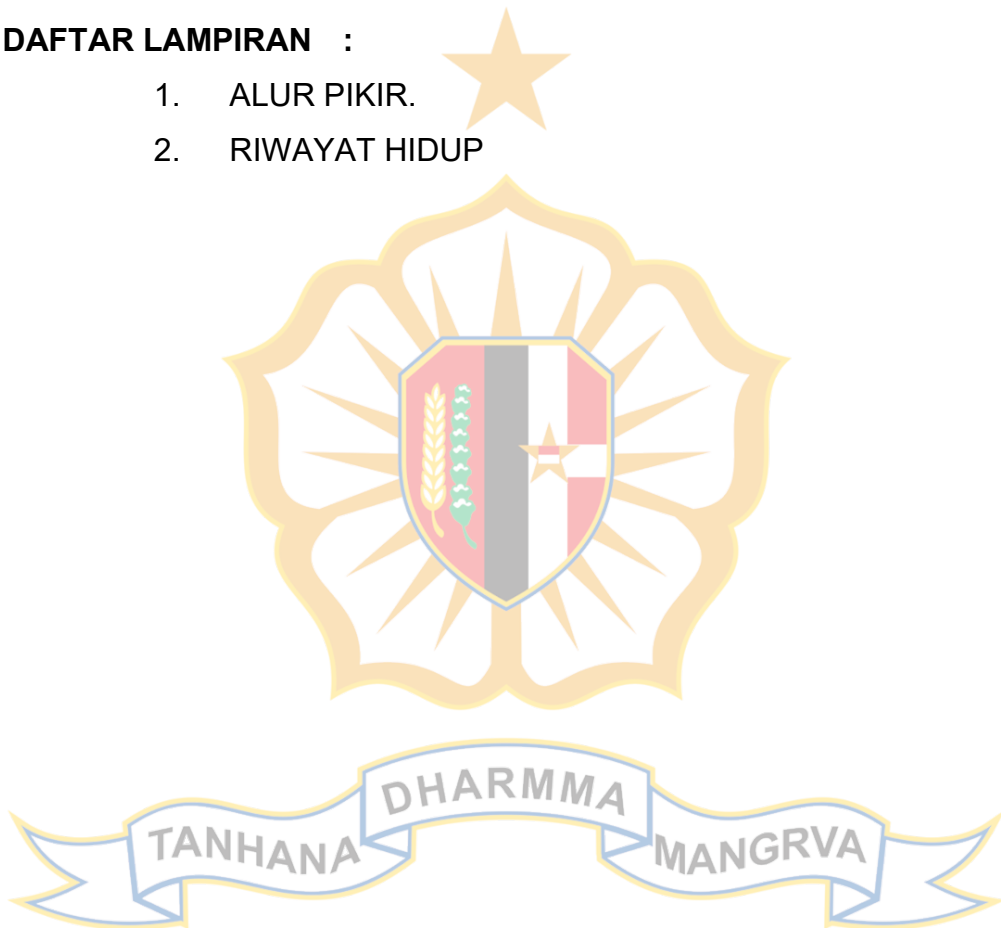
BAB IV PENUTUP

17. Simpulan	58
18. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA :

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP

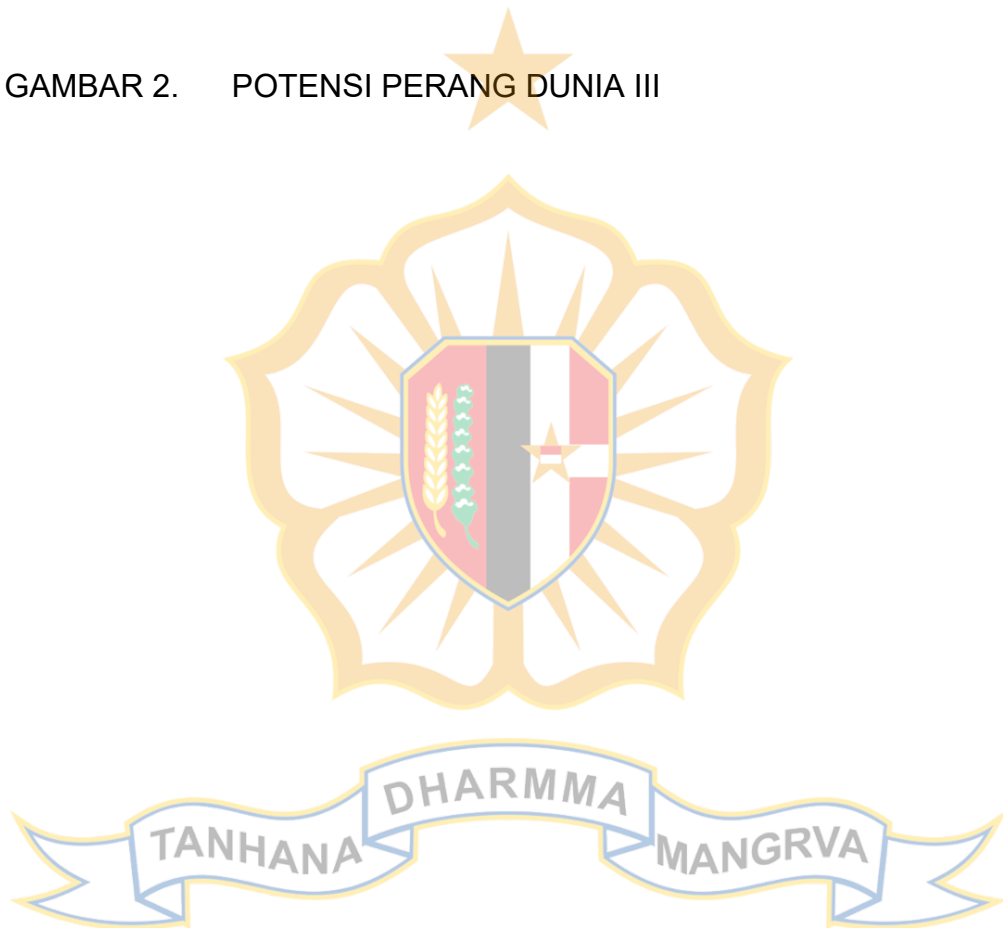


LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. KEKUATAN ALUTSISTA INDONESIA.

GAMBAR 2. POTENSI PERANG DUNIA III



DAFTAR GAMBAR

TABEL 1. EKSPOR INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kolonel Inf Choirul Anam, S.E.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX
Lemhannas RI Tahun 2020
Judul Taskap : Peran Diplomasi Pertahanan Untuk Mendukung
Ketahanan Nasional

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk di uji.

“coret yang tidak diperlukan”

Jakarta, Juni 2020
Tutor Taskap



Drs. H. Edijan Tandjung, M.Si
Tajar Bidang Politik dan Sismennas

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Dalam melakukan pembahasan mengenai peran diplomasi pertahanan dapat ditinjau melalui perspektif geostrategi. Secara umum, geostrategi dapat dipahami sebagai perencanaan komprehensif dan penerapan upaya-upaya mencapai tujuan baik menggunakan kekuatan militer atau aspek lainnya dengan memperhatikan pertimbangan geografis dan dampaknya pada politik.¹ Sementara geostrategi Indonesia, merupakan cara bangsa Indonesia mengembangkan kekuatannya berdasarkan konstelasi geografis melalui pembangunan nasional, untuk mewujudkan cita-cita nasional sesuai yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.²

Geostrategi merupakan dasar dalam perumusan Ketahanan Nasional. Definisi Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.³

Dalam implementasinya, penerapan geostrategi Indonesia sangat penting khususnya terkait dengan kedaulatan Negara. Sebagaimana diketahui berkaitan dengan kedaulatan negara, bangsa Indonesia setidaknya sudah dua kali kehilangan bagian integralnya yakni dengan lepasnya Timor Timur di tahun 1999, serta Pulau Sipadan dan Ligitan di

¹ Zbigniew Brzezinski, *Game Plan: A Geostategic Framework for the Conduct of the US-Soviet Contest*. Boston : The Atlantic Monthly Press (1986), hal 6

² Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020, Naskah Lembaga Bidang Studi *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX.

³ *ibid*

tahun 2002.⁴ Kedua situasi tersebut merupakan indikasi tidak tanggunhnya Ketahanan Nasional.

Oleh sebab itu dalam upaya mendukung ketahanan nasional, maka dibutuhkan kemampuan segenap komponen bangsa dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis (lingstra) di sekitarnya. Salah satu upaya yang dapat dikedepankan adalah dengan meningkatkan peran diplomasi pertahanan. Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, visi pemerintahan Presiden Jokowi adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian terjewantahkan dalam berbagai bidang, dalam hal ini terkait misi di bidang pertahanan adalah perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga, yang dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan agar lebih modern dan TNI yang profesional.⁵

Aplikasi dari bidang pertahanan tersebut kemudian tertuang pada kebijakan pertahanan negara yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan. Salah satu yang menjadi prioritas dan sasaran strategis dalam bidang pertahanan adalah penguatan diplomasi pertahanan.⁶ Diplomasi Pertahanan, dapat dipahami sebagai aktivitas perdamaian internasional yang didasarkan pada dialog dan kerja sama, diimplementasikan dalam organisasi bilateral, multilateral, dan internasional oleh kementerian pertahanan suatu negara dan institusi serta pasukan yang bertanggung jawab kepada kementerian tersebut. Angkatan bersenjata dengan sekutu, mitra, dan negara-negara sahabat lainnya perlu mendukung pencapaian

⁴ Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2020, Naskah Lembaga Bidang Studi *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX.

⁵ Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP / 104 / M / I / 2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020

⁶ “Taktik Prabowo Modernisasi Alutsista TNI: Diplomasi Pertahanan hingga ke 7 Negara” *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/07444881/taktik-prabowo-modernisasi-alutsista-tni-diplomasi-pertahanan-hingga-ke-7?page=all> pada 18 Februari 2020 pukul. 22.17 WIB.

tujuan diplomasi pertahanan suatu negara, terutama di bidang keamanan.⁷

Untuk itu, TNI sebagai *stakeholder* pada bidang pertahanan negara memiliki fungsi vital dalam diplomasi pertahanan yang saat ini sudah termanifestasi dengan baik dalam bentuk pengiriman pasukan dalam misi perdamaian dan penempatan atase pertahanan sebagai perwakilan diplomatik.⁸ Selain itu, beberapa bentuk diplomasi pertahanan yang sudah dilakukan diantaranya adalah latihan bersama, bantuan kemanusiaan atau pertukaran perwira.

Lebih lanjut, hasil kajian yang dirilis oleh Universitas Pertahanan menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa diplomasi pertahanan memiliki peran penting bagi Indonesia. Pertama, *defence diplomacy for Confidence Building Measures* (CBM). CBM adalah pembangunan kepercayaan antara suatu negara dengan negara lain dengan cara bekerja sama. Diplomasi pertahanan dapat dilihat sebagai suatu upaya CBM, sehingga meminimalisir terjadinya konflik di antara negara-negara yang notabene sudah menjalin kerja sama secara mendalam. Contohnya adalah Komunitas Politik-Keamanan ASEAN yang dapat dilihat sebagai implementasi CBM di antara negara-negara Asia Tenggara. Langkah ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik di antara negara-negara anggota ASEAN.⁹

Kedua, *defence diplomacy for defence capability*. Pada konteks ini diplomasi pertahanan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kapabilitas dan kompetensi di bidang pertahanan. Contohnya adalah keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dalam *East Asia Summit* (EAS). EAS dibentuk untuk memperdalam kerja sama negara-negara ASEAN dengan *great powers* di dunia, termasuk Amerika Serikat, India, Rusia, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan.¹⁰

⁷ Lech Drab, "Defence Diplomacy – An Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State" *Security and Defence Quarterly* Vol. 20, 2018.

⁸ Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Belanda.

⁹ *ASEAN Political Security Community Blueprint*, ASEAN, 2009.

¹⁰ Nick Bisley, "The East Asia Summit and ASEAN : Potential and Problems" *Contemporary Southeast Asia* Vo.39, No.2 (2017).

Ketiga, *defence diplomacy for defense industry*. Indonesia sebagai negara berdaulat tentu tidak ingin kedaulatannya diganggu oleh ancaman, gangguan, dan hambatan dari aktor internasional lainnya. Sehingga penguatan industri strategis pertahanan merupakan pilihan yang rasional untuk mengoptimalkan potensi industri dalam negeri. Melalui diplomasi pertahanan dengan negara yang lebih maju dalam bidang industri pertahanan, diharapkan transfer teknologi dapat terjadi serta sumber daya manusia Indonesia dapat lebih berkembang. Termasuk didalamnya beberapa kemampuan yang dapat dikembangkan antara lain *information seeking* dan *analytical thinking*.¹¹

Berbagai urgensi di atas tentu harus diikuti oleh kebijakan diplomasi pertahanan yang tepat dan visioner. Lemahnya diplomasi pertahanan dapat berpengaruh kepada berbagai hal, terutama dalam aspek pencegahan konflik dan kerja sama militer. Ketidakmampuan dalam berdiplomasi akan tercipta mispersepsi bahwa Indonesia tidak memiliki keinginan timbal balik (*mutual-interest*) untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan. Selain itu, lemahnya diplomasi pertahanan juga akan berdampak pada sulitnya mempertemukan kepentingan bersama antar negara, serta membuat negara-negara lain memiliki persepsi negatif terhadap Indonesia.

Secara spesifik dalam praktek, lemahnya diplomasi pertahanan juga akan membuat gelar pertahanan menjadi lemah karena diplomasi pertahanan juga berhubungan dengan reformasi pertahanan dengan negara mitra. Terakhir, lemahnya diplomasi pertahanan juga akan menyebabkan kerja sama di bidang militer menurun intensitasnya karena minimnya insentif untuk bekerja sama.¹²

Oleh karena itulah peningkatan peran diplomasi pertahanan diharapkan dapat mendukung ketahanan nasional. Peran yang dimaksud meliputi aspek *Confidence Building Measures (CBM)*, *Defence Capability*, dan *Defense Industry*. Dalam melakukan peningkatan peran tersebut

¹¹ Syaiful Anwar, "Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan" Jurnal Pertahanan Vol.4, No.2 (2014).

¹² Andrew Cottey and Anthony Foster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, London : IISS (2004), 15-17.

dapat merujuk pada konsep manajemen yang berbasis *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC). Hal itu di mulai dari perencanaan diplomasi pertahanan, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, hingga pengawasan terhadap efektivitas peran diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan yang efektif akan membuat negara memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi ancaman dan tantangan di tengah dinamika lingkungan strategis internasional, sehingga berpengaruh positif terhadap Ketahanan Nasional. Selain itu, penguatan diplomasi pertahanan akan dapat menggabungkan kepentingan antara Indonesia dengan negara *great powers*, sehingga Indonesia memiliki *bargaining power* yang lebih tinggi ketika menghadapi mereka.¹³

2. Rumusan Masalah.

Pelaksanaan diplomasi pertahanan dapat dioptimalkan melalui berbagai kemitraan dan pemanfaatan sumber daya nasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjalankan diplomasi pertahanan, baik yang meliputi aspek perencanaan, pemahaman terhadap substansi, hingga aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Belum maksimalnya peran diplomasi pertahanan juga ditentukan oleh hubungan antar kelembagaan khususnya dengan kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, permasalahan yang diajukan adalah "***Bagaimana meningkatkan peran diplomasi pertahanan untuk mendukung Ketahanan Nasional?***"

Merujuk pada berbagai implikasi di atas, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana membaca dinamika ancaman lingkungan strategis di tingkat regional dan global yang semakin meningkat dan *unpredictable*?
- b. Bagaimana menjalankan kerangka kemitraan dan kerjasama strategis yang ideal sesuai kebijakan pertahanan negara 2020?

¹³ Jim Murphy, "The Need for Defence Diplomacy" *RUSI*, 3 Mei 2012. Diakses melalui <https://rusi.org/commentary/need-defence-diplomacy> pada 19 maret 2020 pukul 18.42.

- c. Bagaimana secara internal tercipta sinergi antar institusi yang berkepentingan dan berwenang untuk mengawal kebijakan diplomasi pertahanan?
- d. Bagaimana mengoptimalkan perencanaan kebijakan nasional yang terkait dengan Diplomasi Pertahanan?

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya diplomasi pertahanan, berikut analisis persoalan yang dihasilkan untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional

b. Tujuan.

Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang diplomasi pertahanan, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan, dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pembahasan akan dibatasi pada tantangan dan upaya untuk memperkuat diplomasi pertahanan yang berlandaskan pada tujuan nasional.

b. Sistematika.

Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini akan membahas situasi umum yang terkait dengan diplomasi pertahanan Indonesia sebagai uraian latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Dibahas pula mengenai pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

3) Bab III Pembahasan.

Pada bab ini akan dianalisis secara detail setiap pokok-pokok bahasan terkait pentingnya diplomasi pertahanan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

4) Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode.

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek kesejahteraan dan keamanan, dengan

analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian.

Agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Peran**, adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.¹⁴

b. **Diplomasi Pertahanan**, dapat dipahami sebagai aktivitas perdamaian internasional yang didasarkan pada dialog dan kerja sama, diimplementasikan dalam organisasi bilateral, multilateral, dan internasional oleh kementerian pertahanan suatu negara dan institusi serta pasukan yang bertanggung jawab kepada kementerian tersebut. Angkatan bersenjata dengan sekutu, mitra, dan negara-negara sahabat lainnya perlu mendukung pencapaian tujuan diplomasi pertahanan suatu negara, terutama di bidang keamanan.¹⁵

c. **Mendukung**, dalam tulisan ini, mendukung dapat dipahami sebagai menyokong, membantu, atau menunjang.¹⁶

d. **Ketahanan Nasional**, adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali press, 2002, 242.

¹⁵ Lech Drab, "Defence Diplomacy – An Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State" *Security and Defence Quarterly* Vol. 20, 2018.

¹⁶ "Dukung" *KBBI*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/dukung> pada 19 Maret 2020 pukul 19.10.

baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional.¹⁷



¹⁷ Tim Pokja BS. Strategi, *Materi Pokok Bidang Studi Strategi Tahun 2019*. Jakarta : Lemhanas (2019), hal 73.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Dalam membahas topik mengenai peran diplomasi pertahanan, maka perlu dilakukan kajian terhadap aspek-aspek yang terdapat di dalam Tinjauan Pustaka. Dalam tulisan ini, tinjauan pustaka akan mencakup peraturan perundang-undangan, serta beragam fakta dan data yang terkait dengan inti pembahasan, kerangka teoritis, serta analisis mengenai pengaruh lingkungan strategis terhadap diplomasi pertahanan. Tinjauan pustaka diharapkan dapat menunjukkan titik temu dari beberapa aspek tersebut, yang kemudian membentuk asumsi awal dalam proses analisis.

Peraturan perundang-undangan akan terkait dengan landasan legal-formal terkait peningkatan diplomasi pertahanan. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga dapat menjadi sumber rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis dan operasionalisasi dari peningkatan peran diplomasi pertahanan dalam mendukung Ketahanan Nasional. Pembahasan di dalam Tinjauan Pustaka ini juga menyangkut temuan sejumlah data dan fakta yang berkaitan dengan peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya mendukung Ketahanan Nasional.

Berdasarkan data-fakta tersebut, dapat dianalisis kerangka teoritis yang digunakan pisau analisis, untuk mengkaji peningkatan peran diplomasi pertahanan dalam mendukung Ketahanan Nasional. Tinjauan Pustaka juga akan menganalisis perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi dinamika diplomasi pertahanan Indonesia. Oleh karena itulah tinjauan terhadap berbagai aspek di atas sangat dibutuhkan untuk dapat menganalisis peran diplomasi pertahanan dalam perspektif Ketahanan Nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.**

Dalam UU tersebut, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional dalam rangka menghadapi masalah internasional. Dalam ayat (4), disebutkan bahwa Menteri luar negeri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Dalam pertimbangan, juga disebutkan bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip bebas aktif.¹⁸

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam pasal 16 ayat (4) disebutkan bahwa Menteri Pertahanan bertugas menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya. Dalam pasal 2, disebutkan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Yang dimaksud dengan keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk mengandalkan pada kekuatan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan negara lain.¹⁹

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam pasal 70 ayat (2), disebutkan bahwa TNI dapat melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan. Sementara

¹⁸ UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

¹⁹ UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

itu dalam pasal 20 ayat (3), disebutkan bahwa penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.²⁰

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori Diplomasi Pertahanan.

See Seng Tan bersama dengan Bhubindar Singh memaparkan mengenai dua konsepsi mengenai diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan yang pertama adalah pragmatis. Dalam melakukan diplomasi pertahanan yang pragmatis, tujuan diplomasi pertahanan adalah untuk menjaga hubungan baik antar negara sekaligus menjaga koeksistensi damai. Sementara itu, diplomasi pertahanan yang kedua adalah diplomasi yang bersifat transformatif. Dalam melakukan diplomasi pertahanan yang transformatif, tujuan tertinggi adalah untuk melakukan reformasi di bidang militer (*revolution in military affairs*), baik di bidang alutsista, perwira militer, maupun manajemen organisasi militer itu sendiri.²¹

Dalam menganalisis mengenai diplomasi pertahanan di Asia, Tan dan Singh melihat bahwa mayoritas negara-negara di Asia diplomasi pertahanannya bersifat pragmatis, sebab mereka berusaha untuk menjaga koeksistensi yang damai, tetapi bukan untuk membentuk integrasi regional. Hal ini terlihat dari beberapa forum yang berada di Asia dan secara khusus di Asia Tenggara, yakni *ASEAN Defense Ministers' Meeting* (ADMM), *ASEAN Defense Minister Meeting Plus* (ADMM Plus) yang melibatkan negara-negara mitra dialog ASEAN seperti Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Keseluruhan pertemuan tersebut berkontribusi terhadap arsitektur regional Asia Tenggara yang saling menghormati kedaulatan masing-masing dengan mendasarkan setiap keputusan kepada konsensus.

²⁰ UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

²¹ See Seng Tan dan Bhubindar Singh (2012). *Introduction. Asian Security*, vol. 8, no. 3, hlm. 222-225

Selain itu, arsitektur keamanan regional di Asia Tenggara juga memiliki keunikan jika dibandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini dikarenakan pembentukan kepercayaan (*confidence building*) di kawasan ini lebih menekankan pada proses informal. Sehingga, negara-negara Asia Tenggara memiliki kekuatan untuk mengikat *great powers* dalam kerja sama yang menguntungkan.²²

b. Teori *Balance of Power*.

Teori *Balance of Power* adalah salah satu pendekatan teori yang diutarakan oleh Kenneth Waltz. Waltz sendiri berfokus pada struktur internasional karena dirinya merupakan seorang *structuralist*. Teori *Balance of Power* secara implisit menyatakan bahwa sistem yang paling stabil adalah sistem bipolar (dua kekuatan utama). Hal ini dikarenakan adanya *check and balances* antara dua kekuatan utama tersebut. Dalam kaitannya dengan diplomasi pertahanan, teori ini mengutamakan dua pendekatan yang mungkin diambil oleh negara, yakni *balancing* (menyeimbangkan kekuatan utama) atau *bandwagoning* (bergabung dengan kekuatan utama). Teori *balance of power* memiliki dua asumsi utama:

- 1) Berbeda dengan sistem domestik yang tersentralisasi dan hierarkis, sistem internasional bersifat anarkis. Dalam artian, tidak ada otoritas yang ditegakkan di atas negara-negara dalam sistem internasional.²³ Karena sifat alamiah dari sistem internasional ini, negara-negara tidak memiliki sebuah pemerintahan dunia yang dapat suatu saat 'melindungi' dalam keadaan bahaya, mereka hanya dapat meningkatkan kapabilitasnya melalui usaha-usaha internal (*internal balancing*) atau penguatan atau usaha-usaha eksternal dengan aliansi atau re-aliansi dengan negara lain (*bandwagoning*). Selain itu negara juga bisa memilih untuk

²² *Ibid*, 227.

²³ Kenneth N. Waltz (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., hlm. 88.

menyeimbangkan salah satu kekuatan utama (*balancing*). Hal ini bisa dilakukan apabila negara memiliki kemampuan yang setara atau mendekati kekuatan utama yang ingin diseimbangkan.

- 2) Negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional, karena negara “menetapkan ketentuan pertukaran, memonopoli “penggunaan kekuatan secara sah” di dalam teritorinya, dan secara umum memberlakukan kebijakan luar negeri dengan “satu suara.”²⁴ Karenanya, negara juga dilihat sebagai aktor kesatuan (*unitar*) dalam sistem internasional.

c. Teori Manajemen.

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu serangkaian aktivitas yang kompleks bertujuan untuk mengarahkan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan kolektif secara efektif dan efisien dalam waktu tertentu. Proses manajemen melibatkan empat aktivitas dasar, yakni: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian kelompok (*Organizing*), Aktualisasi atau mewujudkan visi yang telah direncanakan (*Actuating*), serta Pengendalian dan Pengawasan (*Controlling*). Proses tersebut harus dilakukan secara terus menerus untuk memastikan agar tujuan organisasi dapat terus tercapai tanpa kecacatan di keseluruhan proses pengelolaannya.²⁵

Teori tersebut terkait dengan diplomasi pertahanan Indonesia karena diplomasi pertahanan membutuhkan strategi agar mencapai kesuksesan secara efektif dan efisien. Diplomasi pertahanan perlu direncanakan dengan melihat kepentingan nasional dalam lingkungan strategis. Sementara itu, pengorganisasian juga perlu dilakukan baik di kalangan diplomat maupun atase pertahanan. Diplomasi pertahanan yang baik juga perlu diaktualisasikan dan diawasi agar tidak terjadi *abuse of power* maupun kelemahan dalam proses diplomasi tersebut.

²⁴ *Ibid.*, hlm 178-179.

²⁵ Ricky W. Griffin, *Management*. United States of America : Cengage Learning (2010)

d. Teori Geopolitik.

Dalam pemikiran Robert Ayson, kebijakan pertahanan tidak dapat dilepaskan dari posisi geografis. Oleh karena itu, kelebihan dan kekurangan dari posisi geografis suatu negara harus menjadi pertimbangan bagi penyusunan kebijakan pertahanan maupun hubungan luar negeri dengan negara lain. Dalam pemikiran geopolitik, kebijakan pertahanan harus dilakukan untuk menangkal potensi ancaman dari negara lain, sekaligus untuk mengimbangi faktor material dari kekuatan suatu negara. Semakin strategis posisi geografis suatu negara, maka negara tersebut akan diuntungkan. Akan tetapi, negara tersebut juga memiliki kemungkinan untuk dipengaruhi negara lain sehingga tidak mandiri dalam menyusun kebijakannya. Ayson mencontohkan bahwa Australia harus melihat ke Utara karena secara geografis ancaman pasti akan datang dari Utara.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat bahwa posisi geografis sangat berdampak pada kebijakan pertahanan. Indonesia memiliki posisi yang strategis secara geografis. Berdasarkan kerangka teoritis Ayson, Indonesia harus mampu membuat kebijakan pertahanan yang mampu menggambarkan kemandirian Indonesia di tengah posisi yang strategis.

10. Data dan Fakta.

Diplomasi pertahanan sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satu program yang dijalankan itu antara lain adalah melalui ekspor (penjualan) produk industri pertahanan Indonesia. Peran diplomasi pertahanan tentu ditujukan untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional Indonesia pada berbagai gatra kehidupan. Apalagi pemerintahan Presiden Jokowi telah berkali-kali menekankan bahwa orientasi diplomasi Indonesia diarahkan pada kepentingan ekonomi nasional, dalam hal ini meliputi: perdagangan luar negeri dan investasi asing.

Dalam tempo 2015 hingga 2018, industri pertahanan Indonesia telah berhasil mendapatkan keuntungan sebesar US\$284 juta dari ekspor industri pertahanan. Empat perusahaan yang berkontribusi besar

terhadap ekspor industri pertahanan terdiri atas tiga perusahaan BUMN dan satu perusahaan BUMS. Keempat perusahaan tersebut antara lain; PT Pindad (BUMN), PT PAL (BUMN), PT Dirgantara Indonesia (BUMN), serta PT Lundin (BUMS). Beberapa produk unggulan dari perusahaan-perusahaan tersebut antara lain: pesawat angkut, kapal angkut laut strategis, senapan dan amunisi, kendaraan angkut anoa, serta kapal kecil patroli. Selengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:²⁶

Tabel 2.1 Ekspor Industri Pertahanan Indonesia

No	Produksi	Komoditi Ekspor	Negara Tujuan	Nilai Ekspor
1	PT. Dirgantara Indonesia	Pesawat Angkut CN-235 Pesawat Angkut NC-212	Senegal Vietnam Thailand	161 Juta US\$
2	PT. PAL	Strategic Sealift Vessels LPD-122mm	Filipina	86,9 Juta US\$
3	PT. Pindad	Senapan & Amunisi Ranpur Anoa	ASEAN Afrika Arab Saudi Korsel Timor Leste Nigeria	32,6 Juta US\$
4	PT. Lundin	Small Patrol Craft Sea Rider	Swedia Rusia	3,6 Juta US\$

Data selanjutnya dapat dicermati dari kemajuan signifikan yang dicapai Indonesia terkait perdagangan senjata dengan negara-negara lain. BPS mencatat ekspor senjata dan amunisi Indonesia pada Januari sampai September 2019 bernilai US\$ 479.500. Angka tersebut bertumbuh 500,26% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Beberapa tujuan ekspor terbesar Indonesia di antaranya adalah Afrika Selatan dengan US\$ 284.832, diikuti oleh Belgia senilai US\$111.889 dan Jepang yang bernilai US\$43.253.²⁷

Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam kekuatan militer di Asia Tenggara serta menempati peringkat 15 di dunia. Hal ini merupakan kelebihan namun harus disikapi dengan baik. Diplomasi pertahanan di Asia Tenggara dibutuhkan dalam rangka untuk

²⁶ Gery Gugustomo, "Ekspor Industri Pertahanan Indonesia Capai Ratusan Juta Dollar Amerika" *Akurat*, 4 Desember 2018. Diakses melalui <https://akurat.co/ekonomi/id-419257-read-ekspor-industri-pertahanan-indonesia-capai-ratusan-juta-dollar-amerika> pada 6 April 2020 pukul 20.00 WIB.

²⁷ "Diam-Diam Ekspor Senjata Indonesia Meningkat 500%" *Kanal 24*, 28 Desember 2019. Diakses melalui <http://kanal24.co.id/read/diam-diam-ekspor-senjata-indonesia-meningkat-500> pada 16 April 2020 pukul 11.02

menghilangkan persepsi ancaman negara lain terhadap Indonesia. Selain itu, Indonesia juga masih berdiplomasi pertahanan dengan baik karena kekuatan angkatan laut yang masih terhitung lemah untuk negara yang memiliki laut sangat luas.²⁸ Selengkapnya dapat dilihat dalam infografis berikut:

Gambar 2.1 Kekuatan Alutsista Indonesia



Terkait dengan peran diplomasi guna meningkatkan kapabilitas pertahanan, pemerintah Indonesia melalui kementerian pertahanan dan mabas TNI telah mengirimkan anggota TNI untuk mengikuti pendidikan di luar negeri. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 1967 sampai dengan saat ini. Selengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:

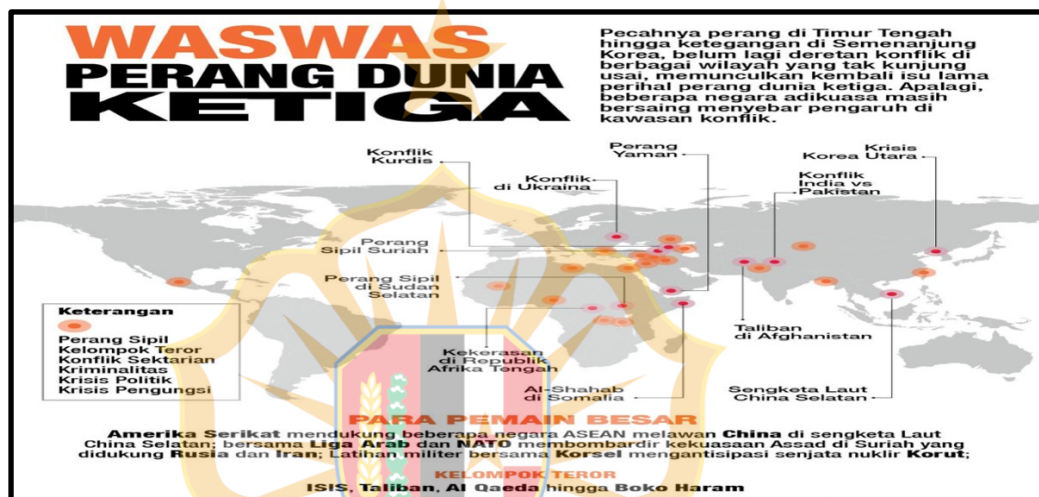
Daftar negara yang menjadi tujuan pendidikan LN

No	Negara	Tahun				
		1967-2016	2017	2018	2019	2020
1	AS	6227	132	165	147	45
2	Australia	2941	70	230	151	42
3	Singapura	1381	100	118	119	10
4	Korea	775	8	8	9	15
5	Belanda	683	1	1	4	-
6	Inggris	636	11	18	13	1
7	Jerman	584	31	24	21	5
8	Malaysia	488	8	5	20	5
9	India	291	15	40	25	8
10	Perancis	299	7	8	22	3

²⁸ Harya Putra, "Alutsista Indonesia Terkuat ke-1 di ASEAN dan ke-15 di Dunia" *PKP Berdikari*, 1 April 2019. Diakses melalui <https://www.pkpberdikari.id/infografis/alutsista-indonesia-terkuat-pertama-di-asean-dan-ke-15-di-dunia/> pada 6 April 2020 pukul 20.08 WIB.

Diplomasi pertahanan juga dibutuhkan untuk mengatasi anarki dalam sistem internasional. Dalam Asia Tenggara, terdapat dinamika dimana Amerika Serikat berupaya membujuk negara Asia Tenggara untuk melawan Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kedua kubu dalam sistem internasional (Amerika Serikat dan Tiongkok) dapat memicu perang dunia ketiga, apalagi dengan ketegangan di Timur Tengah dan Korea. Selengkapnya, informasi dapat disimak dalam infografis berikut:²⁹

Gambar 2.2 Potensi Perang Dunia III



11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

Perkembangan lingkungan strategis dapat mempengaruhi upaya untuk meningkatkan peran diplomasi pertahanan dalam memperkuat ketahanan nasional. Penyelenggaraan pertahanan sangat terkait dengan keadaan atau geografi yang melingkupi suatu negara. Oleh karena itulah diperlukan strategi sebagai wujud adaptasi dari negara bersangkutan. Salah satu wujud dari strategi tersebut adalah diplomasi pertahanan.

Strategi merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar yang melingkupinya. Misalnya, Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni global berusaha untuk mencegah bangkitnya negara hegemoni baru di Eurasia karena dinilai akan mengubah strategi dan pengaruh

²⁹ Dini Nurilah, "Waswas Perang Dunia Ketiga" *Liputan 6*, 28 April 2017. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/2934111/waswas-perang-dunia-ketiga> pada 6 April 2020 pukul 20.17 WIB.

geopolitiknya di kawasan.³⁰ Pengaruh lingkungan strategis ini dapat merujuk pada pendekatan teori oleh Robert Ayson mengenai pentingnya aspek geografis dalam kebijakan pertahanan, termasuk di antaranya adalah diplomasi pertahanan.

Dalam menganalisis kondisi geografis di sekitar suatu negara, Ayson meminta setiap negara untuk mencari sumber ketidakstabilan (*arc of instability*) yang dapat menjadi tantangan bagi pelaksanaan politik luar negeri di bidang keamanan. Strategi suatu negara haruslah sebuah solusi untuk menangani tantangan tersebut.³¹ Berkaitan dengan *arc of instability*, Ayson melihat kondisi strategis aspek geografi, yang digunakan untuk melihat negara apa yang menjadi tantangan, ancaman, serta berpotensi untuk menjadi *regional power* maupun *big powers* di kawasan tersebut. Misalnya, Ayson melihat bahwa Australia memiliki ancaman dan tantangan terbesar dari Indonesia. Oleh karena itu, strategi pertahanan yang diambil harus menangkal pengaruh Indonesia di kawasan.³²

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi diplomasi pertahanan Indonesia akan sangat bergantung kepada lingkungan strategis, terutama mengenai *power distribution* di kawasan. Pemahaman komprehensif mengenai arsitektur keamanan menjadi penting bagi perumusan kebijakan diplomasi pertahanan, yang dapat menjadi medium untuk menangkal pengaruh negara tertentu.

a. Lingkungan Strategis Global.

Struktur sistem internasional yang mulai dikuasai oleh dua kekuatan utama, Amerika Serikat dan China mempengaruhi praktek diplomasi pertahanan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif, sehingga memilih untuk tidak melakukan *bandwagoning* kepada dua kekuatan tersebut. Pada umumnya, negara di Asia Tenggara melakukan *hedging* dengan memenuhi kepentingan ekonomi dengan China, tetapi menjalin kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat.

³⁰ "Defense Primer: Geography, Strategy, and U.S Force Design" CRS, 17 Maret 2020. Diakses melalui <https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF10485.pdf> pada 19 Maret 2020 pukul 21.36.

³¹ Robert Ayson, "The Importance of Geography" in *Power, Strategy, and Defence Policy* by Desmond Ball and Sheryn Lee. Canberra : ANU Press (2016), halaman 70-71

³² *Ibid*, 73

Tujuan dari *hedging* adalah untuk menyeimbangkan pengaruh antara keduanya di kawasan Asia Tenggara.³³

Indonesia, seperti negara Asia Tenggara lainnya juga berupaya untuk mengejar strategi *hedging* dengan menjalin kerja sama ekonomi dengan China tetapi tetap menganggap Amerika Serikat sebagai negara utama yang memiliki pengaruh geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tidak terlepas dari konflik keamanan dengan China di kawasan Laut China Selatan sehingga Indonesia mulai melihat China sebagai ancaman di laut. Alasan untuk tidak sepenuhnya beraliansi dengan Amerika Serikat merupakan alasan yang sangat pragmatis. Selain karena prinsip politik luar negeri bebas aktif, hal ini juga dikarenakan Indonesia tidak ingin bertaruh pada *uncertainties* yang sering ditunjukkan Amerika Serikat, terutama pada masa Donald Trump.³⁴

Pengaruh global terhadap diplomasi pertahanan juga dapat dicermati dari efek akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Dunia masih menunggu berbagai kemungkinan dampak yang dihasilkan pandemik Covid-19 terhadap jalannya politik internasional. Covid-19 dapat mengganggu pemenuhan komitmen dalam kesepakatan antarnegara, termasuk mengubah perilaku-perilaku negara dalam masa-masa pandemi terkait peta kemitraan dan persahabatan antarnegara.³⁵

Namun di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan peran diplomasi pertahanannya. Sebagai contoh, Korea Selatan yang selama ini sudah menjadi mitra strategis di bidang pertahanan telah memutuskan memilih tiga negara prioritas untuk mengirimkan bantuan dalam mendukung penanganan wabah Covid-19, salah satunya adalah Indonesia di samping Amerika Serikat dan Uni

³³ Jurgen Haacke, "The Concept of Hedging and Its Application to Southeast Asia: A Critique and A Proposal For A Modified Conceptual and Methodological Framework" *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 19, Issue 3, September 2019, 375-417.

³⁴ Iis Gindarsah, "Indonesia's Defence Diplomacy : Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties" *RSIS Working Paper* No. 293, 9 Juni 2015.

³⁵ Shafiah F. Muhibat, *Tantangan Stabilitas Politik Kawasan Indo Pasifik dan Sinergi Aktor di Kawasan*, Diskusi Panel Politik dan Hubungan Internasional PPRA LX 16 April 2020

Emirat Arab.³⁶ Momentum ini tentu juga dapat dioptimalkan dengan negara lainnya, yang selama ini sudah menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia serta memiliki kapasitas untuk mempercepat penanganan dampak pandemi Covid-19.

Sementara dalam upaya menyeimbangkan pengaruh dengan China, Indonesia berupaya menjalin kerja sama diplomasi pertahanan dengan India. Hal ini dikarenakan adanya *shared interest* antara India dengan Indonesia, yakni untuk menangkal pengaruh Tiongkok di Samudra Hindia sekaligus menyelesaikan berbagai isu bersama, seperti penanganan perompakan laut di kawasan Samudra Hindia. Dalam kerja sama diplomasi pertahanan tersebut, beberapa bentuk kerja samanya antara lain *Joint Defence Cooperation Committee* (JDCC) dan *India-Indonesia Coordinated Patrol* (Ind-Indo Corpat). Dalam prakteknya, Ind-Indo Corpat merupakan bentuk diplomasi pertahanan terbaik sejak 2002 karena berhasil mencegah terjadinya kejahatan transnasional di Samudera Hindia.³⁷

Perkembangan teknologi serta persenjataan juga mempengaruhi pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia. Anggaran pertahanan di Asia meningkat 27,2 persen semenjak tahun 2010. Peningkatan anggaran tersebut menyebabkan modernisasi persenjataan di negara-negara Asia. Hal ini berpotensi meningkatkan konflik asimetris antara satu negara dan negara lainnya. Misalnya, China melalui modernisasi teknologinya dapat menyebarkan proyeksi kekuatannya di Laut China Selatan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa teknologi China menjadi *destabilizing factors* di Asia.³⁸

b. Lingkungan Strategis Regional.

Dalam wilayah Asia Tenggara, terdapat beberapa forum yang dijadikan wadah bagi diplomasi pertahanan. Kontur keamanan Asia

³⁶ "Korsel Prioritaskan Ekspor Alat Tes Virus Corona Untuk Indonesia Ini Alasannya", diunduh dari <https://news.detik.com/internasional/d-4956595/korsel-prioritaskan-ekspor-alat-tes-virus-corona-untuk-indonesia-ini-alasannya>, diakses pada Jumat 17 April 2020 pk.17.02 WIB

³⁷ Marina Ika Sari, Leonard Hutabarat, Amarulla Octavian, "Indonesia-India Defense Diplomacy in the Indian Ocean" *Jurnal Pertahanan* Vol. 4, No.2 (2018).

³⁸ Iis Gindarsah, *Op.Cit*, Hal.6

Tenggara merupakan kontur yang unik karena negara yang dikategorikan sebagai *middle powers* menggunakan institusi untuk mengikat negara-negara *great powers*. Salah satu forum tersebut adalah *ASEAN Regional Forum (ARF)*. *ASEAN Regional Forum* merupakan wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.³⁹

Pengaruh ASEAN menjadi semakin penting bagi diplomasi pertahanan karena sudah terbangun *ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP)* yang melibatkan banyak negara. Walaupun berfokus pada isu kemaritiman, SDG's, kerjasama ekonomi dan konektivitas⁴⁰, namun negara-negara yang tergabung dalam kerangka AOIP dapat menjadi mitra strategis dalam upaya mendukung diplomasi pertahanan Indonesia, utamanya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

Forum diplomasi pertahanan yang penting lainnya adalah *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)*. Berbeda dengan ARF yang turut mengikat *great powers*, ADMM seluruhnya adalah negara ASEAN. ADMM merupakan *platform* kerja sama antar Menteri Pertahanan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan *confidence building measures (CBM)* serta menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama praktis. Dalam ADMM, juga dikenal ADMM-Plus yang juga melibatkan Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, India, dan Rusia. ADMM sendiri memiliki tujuh area isu kerja sama yakni intervensi kemanusiaan, medis-militer, kontra-terorisme, keamanan maritim, operasi perdamaian, *Humanitarian Mine Action*, serta keamanan siber. Indonesia sendiri berwenang sebagai *co-chair* di bidang operasi perdamaian, bersama-sama dengan Australia.⁴¹

³⁹ "Forum Regional ASEAN (ARF)" *Kementerian Luar Negeri RI*, 8 April 2019. Diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/126/halaman_list_lainnya/forum-regional-asean-arf pada 6 April 2020 pukul 22.47 WIB.

⁴⁰ Direktorat Kerjasama Politik Keamanan ASEAN, *ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP)*, disampaikan pada Diskusi Panel PPRA LX Tahun 2020 Lemhannas RI

⁴¹ "ASEAN Defence Ministers Meeting" *Sekretariat ASEAN*. Diakses melalui <http://setnas-asean.id/asean-defence-ministers-meeting-admm> pada 6 April 2020 pukul 22.56 WIB.

Sementara itu, apabila kita melihat dari arsitektur keamanan regional di Asia Tenggara, kebangkitan dari China dan kemunduran Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan ASEAN melalui ADMM tidak memiliki kerangka institusional yang kuat untuk melaksanakan diplomasi pertahanan yang mengikat kedua *great powers* tersebut. Forum-forum seperti ADMM sering digunakan negara Asia Tenggara untuk mendiskusikan isu-isu yang non-kontroversial. Hal ini juga terkait prinsip-prinsip ASEAN yang saling menghormati kedaulatan dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus.⁴²

Hal ini juga berpengaruh pada kerangka diplomasi pertahanan Indonesia. Indonesia memilih untuk berfokus pada ekonomi dibanding pertahanan. Walaupun terdapat perhatian pada pertahanan, akan tetapi ekonomi tetap menjadi prioritas Indonesia. Hal ini mungkin terlihat dari berbagai kebijakan yang cenderung dekat dengan Tiongkok.⁴³

c. Pengaruh Lingkungan Strategis Nasional

Berdasarkan berbagai gatra-gatra Ketahanan Nasional (Astagatra), terdapat berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap diplomasi pertahanan guna meningkatkan ketahanan nasional Indonesia.

1) **Geografi**, Indonesia adalah negara yang memiliki luas 8.300.000 km². Dari wilayah tersebut, 6.400.000 km² di antaranya merupakan perairan. Indonesia juga merupakan negara kepulauan, dengan 17.504 pulau.⁴⁴ Bentuk wilayah geografi NKRI harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan karena Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis. Misalnya, Selat Malaka sendiri menjadi perebutan antara *great powers* seperti Amerika Serikat, India, China dikarenakan jumlah perdagangan

⁴² "Defence Diplomacy in Southeast Asia" *RSIS Conference Report*, 30 November 2010.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Hendry Sianturi, "Ini Data Baru Kewilayahan Laut Indonesia" *Gatra*, 10 Agustus 2018. Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/337332-Ini-Data-Baru-Kewilayahan-Laut-Indonesia> pada 6 April 2020 pukul 23.20 WIB.

yang melewati selat tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan diplomasi pertahanan untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Salah satu contoh seperti yang sudah diutarakan adalah diplomasi pertahanan dengan India.

2) Demografi : Struktur kependudukan Indonesia juga mempengaruhi pelaksanaan diplomasi pertahanan di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara terbesar dalam pemilihan langsung serentak di suatu negara sejak tahun 2014 dengan 187 juta pemilih. Selain itu, Indonesia juga sudah dikenal sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia.⁴⁶ Dengan struktur kependudukan tersebut, dalam diplomasi pertahanan, Indonesia dapat berperan sebagai *bridge-builder*, yakni penghubung antar negara-negara, baik antara negara Islam dengan demokratis maupun antar negara demokratis dan lain-lain.⁴⁷

3) Sumber Kekayaan Alam : Indonesia memiliki SKA yang beragam. Salah satu SKA tersebut adalah di bidang maritim, dimana Indonesia adalah habitat 50 persen spesies ikan dunia dan 75 persen spesies terumbu karang dunia. Kekayaan alam tersebut pun belum semua tereksplorasi dan dikelola dengan baik.⁴⁸ Oleh karena itu, salah satu diplomasi pertahanan yang perlu dikembangkan adalah diplomasi maritim berlandaskan lima pilar kebijakan maritim, yakni budaya, sumber daya, infrastruktur, diplomasi, dan pertahanan. Diplomasi juga membantu memperkuat klaim Indonesia dalam konflik di Laut China Selatan.⁴⁹

⁴⁵ Li Jiacheng, "Developing China's Indian Ocean Strategy" *China Quarterly of International Strategic Studies* Vol.3, No.4, 2017, 481-497.

⁴⁶ Yeremia Sukoyo, "Indonesia Jadi Contoh Negara Demokrasi Terbesar di Asia" *Berita satu*, 3 Oktober 2018. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/politik/514379-indonesia-jadi-contoh-negara-demokrasi-terbesar-di-asia.html> pada 6 April 2020 pukul 23.25 WIB.

⁴⁷ Mayjen TNI Purn. Dr. I Gede Sumertha, "Diplomasi Militer dalam Perspektif Historis" *Rakornis Sejarah TNI*, April 2018.

⁴⁸ Imarotul Izzah, "Guru Besar Geofisika UB: Kekayaan Maritim Indonesia Banyak yang Belum Tereksplorasi" *Malang Times*, 14 November 2019. Diakses melalui <https://www.malangtimes.com/baca/46205/20191114/165400/guru-besar-geofisika-ub-kekayaan-maritim-indonesia-banyak-yang-belum-terekplorasi> pada 6 April 2020 pukul 23.34.

⁴⁹ Yeremia Sukoyo, "Kekuatan Diplomasi Maritim Indonesia Terus Diperkuat" *Berita satu*, 14 November 2019. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/585317/nasional/585317-kekuatan-diplomasi-maritim-indonesia-terus-diperkuat> pada 6 April 2020 pukul 23.36 WIB.

4) Ideologi : Pelaksanaan diplomasi pertahanan tentu harus dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila, baik sebagai ideologi nasional, dasar negara, maupun sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila terkandung sejumlah nilai, di antaranya pada sila ketiga yang meliputi: nilai persatuan bangsa, nilai kemandirian dan nilai kesatuan wilayah. Peran diplomasi pertahanan tentu harus dapat mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan riil, sehingga mampu mendukung Ketahanan Nasional.

5) Politik. Pada tahun 2020, Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun telah mempraktekkan diplomasi pertahanan ke setidaknya tujuh negara. Prabowo berkeliling tujuh negara tersebut sebagai Menteri Pertahanan bertujuan untuk melihat alutsista yang kemudian akan dianggarkan untuk alutsista Indonesia. Pemenuhan alutsista masih impor. Tetapi, Kemhan memastikan bahwa Indonesia memiliki kemerdekaan dan kemandirian untuk menentukan asal sistem senjata yang akan dibeli.⁵⁰

6) Ekonomi. Pada tahun 2020, Kemhan memiliki anggaran pertahanan sebesar Rp127,357 triliun.⁵¹ Indonesia pun cukup memiliki potensi ekspor industri pertahanan walaupun masih kecil. Pada tahun 2018, ekspor industri pertahanan mencapai Rp 4 triliun. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor industri pertahanan, di samping pengadaan alutsista dari anggaran Kementerian Pertahanan.⁵²

7) Sosial Budaya. Pelaksanaan diplomasi pertahanan tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang berkembang pada lingkup

⁵⁰ _____, "Jubir Menhan Paparkan Diplomasi Pertahanan Ala Prabowo" *CNBC Indonesia*, 1 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200128160037-8-133383/jubir-menhan-paparkan-diplomasi-pertahanan-ala-prabowo> pada 6 April 2020 pukul 23.42 WIB.

⁵¹ Restu Diantina Putri, "Anggaran Kemenhan Era Menteri Prabowo : Jumbo dan Tertutup" *Tirto*, 26 November 2019. Diakses melalui <https://tirto.id/anggaran-kemenhan-era-menteri-prabowo-jumbo-dan-tertutup-emjK> pada 6 April 2020 pukul 23.49 WIB.

⁵² Aria Pradana, "Ekspor Industri Pertahanan Indonesia Capai Rp4 Triliun" *Kumparan*, 26 November 2018. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ekspor-industri-pertahanan-indonesia-capai-rp-4-triliun-1543209940009121424> pada 6 April 2020 pk.23.51.

nasional. Budaya memiliki peran penting dalam proses diplomasi karena menyangkut *bargaining position* dan juga menjadi identitas serta kekuatan bangsa. Hal ini misalnya dapat tercermin dari peran diplomasi Indonesia dalam menjembatani konflik maupun mempererat persahabatan antar negara. Demikian pula halnya dalam konteks diplomasi pertahanan, nilai-nilai budaya Indonesia yang dikenal penuh kehangatan, persahabatan dan menghindari konflik juga dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang memiliki keunggulan di bidang industri pertahanan, baik dalam hal transfer pengetahuan, teknologi, maupun dalam perdagangan dan investasi di bidang pertahanan.

8) Hankam. Dalam penyelenggaraan pertahanan, TNI memiliki tugas untuk menjaga keselamatan segenap bangsa, seluruh tumpah darah, kedaulatan wilayah, dan keutuhan NKRI. Dalam diplomasi pertahanan, TNI melakukan pengerahan pasukan Garuda untuk melakukan misi perdamaian dunia dengan *soft power* yang khas, sehingga pasukan garuda memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan kontingen negara lain. Selain itu, TNI juga dituntut untuk menjaga keamanan wilayah dengan negara perbatasan serta mendukung kebijakan politik keamanan Indonesia dalam *ASEAN Security Community*.⁵³



⁵³ Wahyu Aji, "Panglima TNI: Diplomasi Pertahanan Alat Penting Kebijakan Keamanan Luar Negeri" *Tribun*, 26 Juni 2014. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/26/panglima-tni-diplomasi-pertahanan-alat-penting-kebijakan-keamanan-luar-negeri>. pada 6 April 2020 pukul 23.56 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dibahas lebih lanjut mengenai peran diplomasi pertahanan dalam mendukung Ketahanan Nasional. Analisis tersebut haruslah dilandasi oleh kerangka teori, memperhatikan temuan data dan fakta, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi dinamika lingkungan strategis yang terkait dengan diplomasi pertahanan. Apalagi diplomasi pertahanan sejatinya sangat terkait dengan pencapaian Tujuan Nasional, dalam hal ini ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahkan lebih jauh lagi, diplomasi pertahanan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan Tujuan Nasional yang lainnya, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Diplomasi merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk mencapai berbagai kepentingan dalam hubungan internasional. Salah satu kepentingan negara tersebut adalah kepentingan di bidang pertahanan. Melalui peningkatan diplomasi pertahanan, maka suatu negara berupaya untuk menjamin keberlangsungannya (*survival*). Sebagai contoh, upaya diplomasi yang ditujukan untuk memperkuat militer maupun membentuk aliansi (sekutu) antar negara, maka negara tersebut sesungguhnya sedang membangun struktur pertahanannya agar tidak mudah diserang dan memiliki daya gentar yang tinggi.

Dalam perkembangannya, diplomasi pertahanan juga dijalankan untuk mendukung misi kemanusiaan (*humanitarian*), memberdayakan perekonomian masing-masing negara, serta mengantisipasi potensi krisis global yang dapat terjadi di masa mendatang. Apalagi ada ketidakpastian sistem hubungan internasional yang dipicu oleh *rise of China* dan kebijakan *America First*, sehingga sangat berpotensi menimbulkan

instabilitas atau dalam perspektif hubungan internasional disebut sebagai sistem yang anarki.

Fenomena inilah yang patut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan dibahas lebih mendalam mengenai: dinamika ancaman lingkungan strategis yang semakin meningkat dan *unpredictable*, kemitraan strategis yang ingin dibangun, sinergi antar institusi yang diharapkan dan perencanaan kebijakan nasional yang terkait dengan diplomasi pertahanan.

13. Dinamika Ancaman Lingkungan Strategis.

Diplomasi pertahanan perlu memperhatikan potensi ancaman lingkungan strategis di tingkat global dan regional. Dalam perkembangan terkini di tingkat global, dunia sedang mengalami ancaman pandemi wabah Covid-19. Sejauh ini, hanya 15 negara dari 193 negara anggota PBB yang belum memiliki kasus Covid-19 per 10 April 2020. Keberadaan wabah Covid-19 diprediksi akan mempengaruhi diplomasi dan kebijakan pertahanan dalam perkembangan selanjutnya. Negara-negara yang sebelumnya memiliki kebijakan pertahanan yang dominan, diprediksi akan mengurangi anggaran kebijakannya. Selain itu, fokus kebijakan pertahanan tidak lagi ke luar, tetapi ke dalam. Hal ini tidak terlepas dari transisi kebijakan dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19, sehingga militer suatu negara akan diberdayakan untuk berfokus pada penanganan wabah tersebut.

Hal ini diprediksi akan turut mempengaruhi diplomasi pertahanan Indonesia. Dengan menurunnya anggaran pertahanan negara-negara tujuan ekspor, maka akan berkurang pula kemungkinan negara-negara tersebut untuk membeli alutsista Indonesia. Selain itu, fokus kebijakan pertahanan yang lebih ke dalam akan mengakibatkan negara-negara *great powers* yang sebelumnya hadir di Asia Tenggara akan mundur perlahan atau mengurangi keterlibatannya. Akibatnya adalah China tidak memiliki penyeimbang, karena negara-negara *great powers* lain cenderung menjauh dari kawasan Asia Tenggara.

Selain wabah Covid-19, kontur pertahanan juga akan dipengaruhi oleh 'Perang Dingin Baru' antara dua negara *great powers*, yakni Amerika Serikat dan China. Dalam interaksinya di tingkat regional, kedua negara memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mempengaruhi sikap negara-negara Asia Tenggara. Amerika Serikat lebih menghendaki untuk membahas kebijakan pertahanan dengan negara Asia Tenggara melalui forum multilateral untuk menyeimbangkan China. Hal sebaliknya dilakukan oleh China dimana mereka membahas kebijakan pertahanan secara bilateral dengan negara-negara tertentu seperti Laos dan Kamboja sehingga mempersulit pengambilan keputusan di tingkat multilateral. Apalagi metode pengambilan keputusan yang melibatkan ASEAN pasti bersifat konsensus dan membutuhkan persetujuan setiap negara. Oleh karena itu, forum pertahanan di Asia Tenggara seperti ASEAN Regional Forum pembahasannya akan difokuskan pada isu-isu yang tidak sensitif seperti latihan dan patroli bersama.

Hal ini tentu saja menimbulkan tantangan baru bagi diplomasi pertahanan Indonesia di tingkat regional. Kesulitan pengambilan keputusan menyebabkan isu-isu keamanan sensitif menjadi tidak terbahas dan tidak terselesaikan dengan baik. Selain itu, pembahasan isu keamanan yang terhambat juga mengakibatkan keseimbangan kekuatan kurang terbentuk di Asia Tenggara. Misalnya, isu Laut China Selatan kurang terbahas dan akhirnya isu tersebut tidak terselesaikan sejak 1990 hingga sekarang.

Isu global lainnya yang cukup menimbulkan disrupsi adalah ancaman global akibat fluktuasi harga minyak. Fluktuasi harga minyak disebabkan oleh perilaku Arab Saudi dan Rusia yang lebih mengutamakan *market share* dibanding *market stabilization*. Sikap keduanya menyebabkan negosiasi yang dimediasi oleh OPEC gagal. Harga minyak pun turun ke level yang cukup rendah dibanding keadaan normal, bahkan terendah sejak tahun 2002 lalu. Harga ini diperkirakan masih akan bertahan lama hingga beberapa bulan ke depan karena kebijakan *lockdown* beberapa negara karena menghadapi Covid-19.

Kebijakan ini dapat berdampak masif karena minyak adalah sumber daya yang paling banyak digunakan oleh hampir seluruh negara.

Fluktuasi harga minyak juga diprediksi akan mempengaruhi berbagai kebijakan pertahanan suatu negara. Penelitian menyebutkan bahwa harga minyak bisa mempengaruhi anggaran pertahanan negara, termasuk anggaran modernisasi alat pertahanan negara. Tidak stabilnya harga minyak menyebabkan tujuan diplomasi pertahanan juga akan berubah. Dalam kasus Brunei Darussalam, diplomasi pertahanan suatu negara akan berfokus pada *Confidence Bulding Measures* (CBM) dengan negara lain apabila harga minyak berfluktuasi. Hal ini dikarenakan terlalu riskan apabila ingin berusaha melakukan *capacity building* di tengah instabilitas harga minyak dunia.

Berdasarkan kasus Brunei, Indonesia mungkin akan melakukan hal yang sama. Apalagi, anggaran pertahanan Indonesia cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, tetap menekankan pada modernisasi alat pertahanan negara di saat pandemi sangat berisiko, karena sekuritisasi wabah ini menyebabkan militer berfokus untuk menangani pandemi daripada melakukan investasi di bidang pertahanan yang dampaknya tidak dirasakan sekarang.

Terakhir, ancaman di level global juga dipengaruhi oleh Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 jika dimanfaatkan dapat membawa kemajuan bagi teknologi pertahanan dan industri pertahanan. Akan tetapi, teknologi pertahanan tinggi saat ini masih dikuasai oleh negara maju sehingga negara berkembang seperti Indonesia perlu memanfaatkan transfer teknologi melalui perjanjian kerja sama dengan negara maju. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan Indonesia perlu menyasar kerja sama dengan negara yang memiliki industri pertahanan yang maju seperti Turki dan Korea Selatan untuk mempermudah transfer teknologi, sehingga industri pertahanan dalam negeri dapat memanfaatkan teknologi 4.0 dalam bidang pertahanan.

Kerja sama industri pertahanan dengan Korea Selatan juga telah menguntungkan Indonesia, terutama di bidang maritim. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

pada Pasal 2, bahwa Indonesia harus memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri, sebagai modal dasar dengan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan negara lain. Kerangka kerja sama pertahanan ini menurut pemikiran Robert Ayson mengenai Geopolitik dan Lingkungan Strategis, tidak dapat dilepaskan dari aspek geografis. Kebijakan pertahanan seharusnya dilakukan untuk menangkal potensi ancaman negara lain, sekaligus menyaingi faktor material kekuatan suatu negara. Kekuatan negara lain perlu diseimbangkan agar kebijakan pertahanan tetap bisa dirumuskan negara secara mandiri, tanpa dipengaruhi oleh negara lain yang memiliki kekuatan lebih besar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dinamika regional sebagai wilayah yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia.

Salah satu yang menjadi pembahasan di tingkat regional adalah Indo-pasifik. Indo-pasifik adalah sebuah konsep/gagasan yang diutarakan berbagai negara untuk mengelola kawasan Indo-pasifik dimana wilayahnya kebanyakan berada di Asia Tenggara. Konsep Indo-pasifik menjadi masalah karena adanya berbagai macam versi yang berpotensi menimbulkan konflik satu sama lain. Konsep yang dominan adalah konsep *Free and Open Indo-pacific* (FOIP) milik Amerika Serikat dan *One Belt One Road* (OBOR) milik China. ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia sudah berusaha untuk merumuskan kebijakan Indo-pasifik dengan sentralitas ASEAN dan mengedepankan dialog. Hal ini juga menjadi salah satu contoh diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo serta manifestasi politik luar negeri bebas aktif. Akan tetapi, sentralitas ASEAN belum tentu efektif karena pengaruh dari negara *great powers* belum tentu terbandung oleh ASEAN, apalagi dengan kondisi negara-negara Asia Tenggara masih bergantung kepada Amerika Serikat dan China baik untuk urusan militer maupun kerja sama ekonomi.⁵⁴

Permasalahan Indo-pasifik juga terkait dengan permasalahan regional berikutnya di Asia Tenggara, yakni adanya negara-negara yang

⁵⁴ Donald E. Weatherbee, "Indonesia, ASEAN, and the Indo-Pacific Cooperation Concept" *ISEAS Perspective*, No. 47, 7 Juni 2019.

secara tradisi dan politiknya lebih dekat dengan salah satu negara *great powers*. Misalkan, Singapura lebih dekat secara politis dan militer lebih dekat dengan Amerika Serikat sementara Kamboja lebih dekat dengan China. Perbedaan pandangan tersebut menghambat pengambilan keputusan secara multilateral dalam forum ASEAN karena ASEAN adalah organisasi yang menggunakan mekanisme pengambilan keputusan secara konsensus atau semua negara harus menyetujui. Hal ini tentunya berdampak pada diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Upaya *Confidence Building Measures* akan terhambat karena kedekatan negara-negara dengan *great powers*, sehingga pengambilan keputusan tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri. Contohnya adalah *ASEAN Centrality on Indo-pacific* yang bisa dibilang sebagai perjanjian yang 'lunak' untuk mengatur kawasan Indo-pasifik.⁵⁵

Perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di tingkat global, regional dan termasuk nasional, telah secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi diplomasi pertahanan Indonesia. Perubahan dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan ini khususnya dapat dicermati dari tujuan untuk memperkuat perdagangan alutsista dan kerja sama pertahanan lintas negara. Hal ini terlihat dari langkah strategis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah mengunjungi setidaknya lebih dari delapan negara sejak menjabat sebagai Menteri, untuk memperluas pangsa pasar dari penjualan senjata produksi Indonesia. Kebijakan ini tentu dilandasi oleh substansi yang tertuang di dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 pada pasal 7 ayat (1), bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu, termasuk dalam hal ini di bidang pertahanan dan selama dijalankan di bawah prinsip Bebas-Aktif.

Upaya ini dilakukan untuk dapat meningkatkan volume perdagangan yang mendukung pengembangan dan kemandirian industri pertahanan. Sebelumnya, industri pertahanan Indonesia telah berhasil mengekspor

⁵⁵ *Ibid*

US\$ 284 juta dalam kurun waktu 2015-2018.⁵⁶ Dalam perkembangannya, industri pertahanan Indonesia juga mulai mendapatkan akses pasar ke Afrika melalui kegiatan diplomatis yang dijalankan oleh Menhan. Salah satu negara Afrika yang menjadi target ekspansi industri pertahanan nasional adalah Ghana, yang akan dijadikan target pemasaran produk industri pertahanan Indonesia ke depannya.⁵⁷

Namun di tengah berbagai langkah strategis yang dilakukan itu, upaya diplomasi pertahanan akhir-akhir ini belum sepenuhnya dipandang masyarakat sebagai tindakan yang penting. Diplomasi pertahanan dipersepsikan sebagai urusan *high politics*, sehingga seringkali hanya melibatkan aktor negara atau industri tanpa keterlibatan masyarakat luas. Hal inilah yang di antaranya turut menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap diplomasi pertahanan cukup rendah. Seringkali masyarakat justru mempertanyakan proses diplomasi pertahanan itu sendiri, misalnya masyarakat mempertanyakan aksi Menhan Prabowo yang sering berkunjung ke luar negeri.⁵⁸

Lebih lanjut lagi, masih terdapat berbagai tantangan terkait ancaman lingkungan strategis terhadap peran diplomasi pertahanan Indonesia. **Pertama**, Indonesia berada dalam posisi dilematis di tengah hegemoni dua negara great powers, yakni Amerika Serikat dan China. Posisi dilematis ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara Asia Tenggara. Di satu sisi, mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dari China. Tetapi di sisi lain, ambisi OBOR China dianggap berbahaya secara pertahanan sehingga perlu penyeimbang dari Amerika Serikat. Hal ini juga ditambah oleh mulai mundurnya Amerika Serikat dari

⁵⁶ Muhammad Iqbal Handewa Putra, "Industri Pertahanan Kalah Nilai Dengan Negara Tetangga: PT Pindad vs ST Kinetics Ltd" *Yonulis*, 21 Desember 2019. Diakses melalui <https://yonulis.com/2019/12/21/industri-pertahanan-kalah-nilai-dengan-negara-tetangga-pt-pindad-vs-st-kinetics-ltd/> pada 20 April 2020 pukul 18.16

⁵⁷ Fariha Sulmaiati dan Happy Fajrian, "Ekspansi ke Pasar Afrika, Pindad Jajaki Ekspor Alutsista ke Ghana" *Katadata*, 23 Januari 2020. Diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/2020/01/23/ekspansi-ke-pasar-afrika-pindad-jajaki-ekspor-alutsista-ke-ghana> pada 20 April 2020 pukul 18.17

⁵⁸ Rolando Sihombing, "PKS Kembali Sentil Kunker Prabowo ke Luar Negeri" *Detik*, 30 Januari 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4878652/pks-kembali-sentil-kunker-prabowo-ke-luar-negeri> pada 20 April 2020 pukul 18.18

kawasan Asia Tenggara sehingga minim kompetitor untuk menyaingi China.

Kedua, diplomasi pertahanan untuk memperkuat *Confidence Building Measures* (CBM) masih lemah. Lemahnya CBM akan menyebabkan ketidakpercayaan antar negara Asia Tenggara, sehingga tidak adanya kohesi dan mudah dipengaruhi oleh negara *great powers*. CBM yang lemah antar negara Asia Tenggara disebabkan oleh ASEAN sebagai organisasi regional hanya bersifat sebagai *security regime*, bukan *security community*. Sebagai *security regime*, ASEAN mampu menghilangkan potensi konflik. Akan tetapi, ASEAN seharusnya bisa mencapai *security community* karena adanya kesamaan ide mengenai keamanan bersama dan tentunya akan mempermudah CBM antar negara Asia Tenggara.

Ketiga, kurangnya kesiapan Indonesia untuk memprediksi potensi ancaman dalam lingkungan strategis. Hal ini terlihat dari berbagai diplomasi pertahanan Indonesia yang cenderung reaktif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Misalkan, kasus Indo-pasifik sebenarnya bisa diantisipasi lebih cepat karena visi OBOR milik China merupakan visi yang sudah direncanakan sejak lama. Hal ini juga menunjukkan kurangnya kesiapan Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi pertahanan.

Dalam menyikapi beberapa masalah tersebut, maka perlu memperhatikan beberapa kerangka teori dan peraturan perundang-undangan. Diplomasi pertahanan yang belum optimal tersebut dapat berdampak negatif terhadap Indonesia, terutama akibat dari pola relasi dalam hubungan internasional yang anarki. Merujuk pada Teori *Balance of Power*, sistem yang anarki tersebut dapat terjadi karena tidak ada otoritas yang ditegakkan di atas negara-negara dalam sistem internasional. Artinya, negara-negara tidak memiliki sebuah pemerintahan dunia yang dapat suatu saat 'melindungi' jika terjadi keadaan bahaya. Mereka hanya dapat meningkatkan kapabilitasnya melalui usaha-usaha internal (*internal balancing*), atau melalui penguatan dan usaha-usaha

eksternal dalam wujud aliansi atau re-aliansi dengan negara lain (*bandwagoning*).

Kurang optimalnya diplomasi pertahanan tersebut juga berdampak pada aliansi dan kemitraan dengan negara lain, sehingga berpotensi mempengaruhi pula upaya untuk melindungi kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia juga akan kurang memiliki daya gentar pertahanan, karena masih ada sebagian kemampuan industri pertahanan yang bergantung pada negara lain. Kemandirian bangsa Indonesia untuk mengambil keputusan di bidang pertahanan juga akan terdampak, karena tertekan oleh negara atau aktor lainnya. Bahkan yang lebih fundamental, lemahnya diplomasi pertahanan Indonesia akan dapat menghambat pencapaian Tujuan Nasional, yakni: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kondisi ini tentu pada akhirnya dapat berdampak pada Ketahanan Nasional, karena bangsa Indonesia menjadi kurang tangguh dalam menghadapi berbagai TAHG.

Kemudian, Teori Geopolitik juga penting untuk menopang peran diplomasi pertahanan. Geopolitik sendiri dalam perspektif diplomasi dapat dipahami sebagai metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya untuk memahami, menjelaskan, dan memperkirakan tindakan negara lain dalam skala geografi. Melalui kemajuan teknologi, pertimbangan geografi tidak hanya meliputi negara-negara yang berada di lingkungan sekitar suatu negara, melainkan juga negara-negara besar yang kehadirannya secara politik dan militer berada di kawasan tersebut juga.

Pengkajian geopolitik dipengaruhi oleh beberapa hal, dengan variabel utama tetap skala geografi. Beberapa hal yang mempengaruhi suatu lingkungan strategis antara lain kemajuan teknologi, kemajuan militer, topografi wilayah, demografi penduduk, hingga keberadaan sumber daya alam tertentu. Dengan demikian, kajian geopolitik dapat menjadi salah satu metode utama untuk memperkirakan perilaku para aktor dan sangat relevan dalam konteks diplomasi pertahanan. Dalam konteks Indonesia, pertimbangan geopolitik tersebut tentu juga harus

selalu diperhatikan dalam upaya memperkuat diplomasi pertahanan. Apalagi posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara sangatlah strategis, karena terletak di antara dua benua dan dua samudera sehingga menyebabkan banyak keterlibatan *great powers* di kawasan tersebut, seperti Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, hingga Amerika Serikat dan China. Dua negara yang disebut terakhir memiliki pengaruh yang cukup besar hingga dapat mempengaruhi perilaku pertahanan negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan Indonesia harus penting dan berhati-hati agar tidak menjadi objek perebutan antara dua *great powers* tersebut.

Oleh karena itu, beberapa masalah yang sudah disebutkan di atas dapat diatasi melalui beberapa kebijakan. **Pertama**, menyikapi posisi Indonesia di antara dua negara *great powers*, Indonesia perlu melakukan *hedging*, yakni dengan memanfaatkan bantuan ekonomi dari China tetapi tetap menerima kehadiran militer Amerika Serikat. Hal ini bisa menimbulkan keseimbangan pengaruh antara keduanya. Negara-negara ASEAN juga bisa bergantung kepada India yang kehadiran militernya cukup kuat di sisi Barat dari Selat Malaka.

Kedua, Indonesia juga perlu mengoptimalkan komunitas keamanan yang sudah ada di ASEAN, yakni *ASEAN Political Security Community* (APSC). Keberadaan APSC idealnya tidak hanya bersifat seremonial formal semata, namun juga harus kritis dan responsif untuk melindungi kepentingan negara-negara anggotanya di kawasan.

Terakhir, Indonesia perlu memperkuat perencanaan diplomasi pertahanan dengan baik untuk ke depannya. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia sangat tertinggal dari aspek perencanaan. Misalnya, Spanyol saat ini sudah memiliki modul diplomasi pertahanan sendiri yang berisi rencana, prioritas, fokus, instrumen, hingga indikator keberhasilan.⁵⁹ Oleh karena itu, diperlukan visi jangka panjang dari diplomasi pertahanan itu sendiri. Untuk penyusunan visi tersebut,

⁵⁹ "Defence Diplomacy Plan" *Ministerio de Defensa*, 2019

Pemerintah bisa melibatkan akademisi atau pakar pertahanan agar tidak salah mengambil keputusan dalam membuat visi.

14. Kerangka Kemitraan Strategis Diplomasi Pertahanan Indonesia.

Dalam urusan hubungan internasional dan pertahanan, setiap negara tidak bisa memenuhi kepentingannya sendiri secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan diplomasi pertahanan yang salah satunya berfungsi untuk membangun kemitraan strategis dalam rangka memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Kementerian Pertahanan terlihat mengambil peran cukup besar dalam melakukan diplomasi pertahanan. Hal ini terlihat dari kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, Turki, China, Jepang, Perancis, dan Rusia.

Dalam kunjungannya ke Malaysia, Menhan Prabowo memperkuat kerja sama di bidang terorisme. Hal ini terkait dengan penculikan yang kerap dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.⁶⁰ Kerja sama penanggulangan terorisme juga dijalin dengan Thailand seiring terbangunnya kesepakatan kerja sama anti-terorisme di tengah-tengah negosiasi ADMM.⁶¹ Selain itu, Menhan Prabowo juga memperkuat kerja sama industri pertahanan dan kerja sama maritim dengan Turki. Hal ini cukup penting bagi Indonesia karena Turki adalah salah satu negara yang memiliki industri pertahanan cukup maju di dunia. Kedekatan dengan Turki pun perlu dipertahankan karena sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak 2010. Kedua negara juga sudah berhasil mengembangkan tank kelas menengah (*medium tank*) dengan teknologi terbaru. Tank tersebut diharapkan sudah akan mulai produksi bersama pada tahun 2020.⁶²

⁶⁰ "Prabowo Jalin Kerja Sama Pertahanan dengan Malaysia" *CNN Indonesia*, 24 Januari 2020. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200124154420-20-468423/prabowo-jalin-kerja-sama-pertahanan-dengan-malaysia> pada 21 April 2020 pukul 12.13.

⁶¹ Gita Irawan, "Prabowo dan Menhan Thailand Bahas Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Terorisme" *Tribun*, 18 November 2019. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/prabowo-dan-menhan-thailand-bahas-peningkatan-kerjasama-penanggulangan-terorisme> pada 21 April 2020 pukul 12.11

⁶² Tanti Yulianingsih, "Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan Prabowo Bertandang ke Turki" *Liputan 6*, 30 November 2019. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/4123306/>

Menhan Prabowo juga berkunjung ke negara Asia Timur seperti China dan Jepang. Kerja sama ke China dilakukan dengan kepentingan utama untuk melakukan modernisasi alutsista. Oleh karena itu, dalam kunjungannya Prabowo mengunjungi SASTIND yang menjadi pusat industri pertahanan China. Selain itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan dengan China juga penting karena China adalah mitra Indonesia di forum multilateral.⁶³ Kedekatan dengan China dapat mempermudah misi kepentingan Indonesia di forum-forum multilateral seperti DK PBB hingga ASEAN Plus.

Selain China, Menhan Prabowo juga mengunjungi Jepang sebagai mitra Indonesia lainnya. Jepang sendiri mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik. Jepang juga siap membantu melatih pasukan TNI dalam seminar trilateral dengan Amerika Serikat. Selain itu, Jepang juga turut membantu manajemen penanggulangan bencana di Indonesia⁶⁴ sebagai salah satu bentuk diplomasi pertahanan yang dapat dijalankan antar negara mitra. Diplomasi Pertahanan semacam inilah yang juga berkontribusi signifikan bagi TNI, karena sebagaimana UU Nomor 34 Tahun 2004 pada Pasal 70 ayat (2), disebutkan bahwa hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan tersebut dapat meliputi tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan.

Menhan Prabowo juga mengunjungi Eropa untuk melancarkan diplomasi pertahanan, utamanya dengan Prancis dan Rusia. Kerja sama pertahanan dengan Prancis tertuang dalam *Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang berisi kerja sama dalam pelatihan dan pendidikan, pengembangan industri pertahanan, bidang sains dan teknologi industri pertahanan, intelijen pertahanan, operasi pemeliharaan perdamaian, misi

perkuat-kerja-sama-pertahanan-menhan-prabowo-bertandang-ke-turki pada 21 April 2020 pukul 12.20

⁶³ Yogi, "Menhan Prabowo Terbang ke China Bahas Peningkatan Kerja Sama Pertahanan" *Detik*, 16 Desember 2019. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4824052/menhan-prabowo-terbang-ke-china-bahas-peningkatan-kerja-sama-pertahanan> pada 21 April 2020 pukul 12.31

⁶⁴ Sarah Gunawan, "Ke Jepang, Menhan Prabowo Tuntut Kerja Sama Yang Lebih Riil" *RMOL*, 22 Desember 2019. Diakses melalui <https://politik.rmol.id/read/2019/12/22/414512/ke-jepang-menhan-prabowo-tuntut-kerjasama-yang-lebih-riil> pada 21 April 2020 pukul 12.37

kemanusiaan dalam bencana, dan penanggulangan terorisme. Hal tersebut pun menjadi penguat dari Dialog Pertahanan Indonesia-Perancis yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2013.⁶⁵

Terakhir, Prabowo juga mengunjungi salah satu negara *great power* yakni Rusia. Kerja sama pertahanan dengan Rusia penting karena adanya interseksi kepentingan antara keduanya, dimana Indonesia membutuhkan modernisasi alutsista sementara Rusia membutuhkan kehadiran Indonesia sebagai mitra strategis di wilayah Asia-Pasifik. Selain modernisasi di bidang militer konvensional dan teknik militer, Indonesia juga menjalin kerja sama di bidang industri pertahanan dan IPTEK, khususnya terkait dengan keamanan siber. Dalam jangka panjang, kerja sama ditargetkan tidak hanya pada pengadaan alutsista bagi Indonesia, melainkan juga produksi bersama dan alih teknologi.⁶⁶

Jika merujuk kepada kebijakan pertahanan negara. Kunjungan ke beberapa negara yang dilakukan oleh Prabowo Subianto cukup searah dengan sasaran strategis yang ingin dicapai. Indonesia ingin meningkatkan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.⁶⁷

Sedangkan aktivitas utama lainnya yang juga penting terkait dengan diplomasi pertahanan dalam rangka membangun kerangka kemitraan strategis, Indonesia melakukan latihan bersama dengan negara-negara mitra terutama dengan negara ASEAN yang sudah terselenggara sejak lama. Sementara, untuk latihan bersama dengan *major power* Indonesia melakukan latihan bersama dengan Amerika Serikat sejak tahun 2007 dengan nama *Garuda Shield*, dengan China sejak 2011 namun berhenti

⁶⁵ Tim Detikcom, "Prabowo Bertemu Menhan Prancis di Paris, Ini Isinya" *Detik*, 13 Januari 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4857873/prabowo-bertemu-menhan-prancis-di-paris-ini-isinya/2> pada 21 April 2020 pukul 12.46

⁶⁶ Tim Detikcom, "Prabowo Bertemu Menhan Rusia, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Teknik Militer" *Detik*, 29 Januari 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4878572/prabowo-bertemu-menhan-rusia-bahas-kerja-sama-pertahanan-teknik-militer/2> pada 21 April 2020 pukul 12.59

⁶⁷ Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020, Halaman 5

sejak 2014 dengan nama *Sharp Knife*, dengan Australia melalui program Wirra Jaya Ausindo, dan dengan India melalui program Garuda Bhakti.

Selain itu, Indonesia juga melakukan berbagai kemitraan strategis dengan lembaga internasional seperti PBB maupun negara lainnya. Beberapa di antaranya adalah *peacekeeping force*, kegiatan tanggap bencana, kerja sama penegakan hukum, dan *humanitarian mission*. *Peacekeeping force* adalah pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia untuk melakukan misi-misi perdamaian di wilayah konflik. Dalam pengiriman *peacekeeping force*, Indonesia bekerja sama dengan PBB untuk mengirim Kontingen Garuda. Hingga Maret 2020, sudah 30 angkatan Kontingen Garuda yang dikirim, dengan yang terakhir bertugas di Lebanon.⁶⁸ Selanjutnya, kegiatan penanganan tanggap bencana dilakukan dengan kerja sama pembangunan infrastruktur tahan bencana, pendanaan rehabilitasi, hingga mekanisme peringatan dini. Indonesia sempat membahas kerja sama ini dalam forum KTT ASEAN-Jepang.⁶⁹

Sementara itu, diplomasi pertahanan juga menyoroti kerja sama antar penegak hukum, yakni kerja sama kepolisian antar negara untuk menyoroti kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, penyelundupan narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, hingga perompakan. Indonesia menjalin kerja sama tersebut dengan ASEAN dan Interpol melalui beberapa kegiatan seperti pertukaran informasi, pelatihan, kemudahan urusan legalitas, *capacity building*, hingga peningkatan kemampuan teknis.⁷⁰ Terakhir, Indonesia juga mengirimkan kontingen kemanusiaan apabila ada negara yang sedang dilanda bencana kemanusiaan. Hal ini juga terkait dengan prinsip aktif dalam pelaksanaan politik luar negeri

⁶⁸ Nibras Nailufar, "Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB" *Kompas*, 4 Maret 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/160000469/kontingen-garuda-dalam-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb> pada 20 April 2020 pukul 22.43

⁶⁹ "Indonesia Bahas Kerja Sama Mitigasi Bencana ASEAN dan Jepang" *KSP*, 15 November 2018. Diakses melalui <http://ksp.go.id/indonesia-bahas-kerja-sama-mitigasi-bencana-asean-dan-jepang/> pada 20 April 2020 pukul 22.44

⁷⁰ "ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime" ASEAN. Diakses melalui https://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime pada 20 April 2020 pukul 22.49

Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengiriman bantuan kemanusiaan ke Nepal saat diguncang gempa 7,9 SR pada tahun 2015 silam.⁷¹

Pelaksanaan kemitraan strategis tersebut tentu harus bersandar kepada kepentingan nasional Indonesia, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Oleh karena itu, kemitraan strategis juga perlu bersandar kepada kebijakan pertahanan negara tahun 2020. Berdasarkan kebijakan pertahanan negara tahun 2020, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Untuk mewujudkan hal tersebut berusaha diwujudkan melalui beberapa hal, di antaranya adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan regional dengan konsep sentralitas ASEAN, peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara tetangga yang bertetangga langsung, pengerahan kekuatan negara untuk tugas perbantuan ke luar negeri serta peningkatan pengiriman pasukan perdamaian yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.⁷²

Secara administratif dan praktis, diplomasi pertahanan bukan hanya urusan dari Kementerian Pertahanan, melainkan juga urusan dari Kementerian Luar Negeri karena termasuk dari bagian hubungan luar negeri. Oleh karena itu, terdapat peran baik dari KBRI maupun KJRI untuk menunjang diplomasi pertahanan. Dalam melakukan diplomasi pertahanan, terdapat tugas dari atase pertahanan. Selain menjalankan tugas pokoknya, atase pertahanan juga berperan dalam mewujudkan kepentingan pertahanan dan meningkatkan hubungan bilateral melalui peningkatan kualitas hubungan dan kerja sama bidang pertahanan. Atase pertahanan menjadi bagian dari misi diplomatik dalam wadah KBRI yang dikepalai oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP).

⁷¹ Alfurkon Setiawan, "Foreign Minister Release the Team of Humanitarian Mission of Indonesia to Nepal" *Setkab*, 30 April 2015. Diakses melalui <https://setkab.go.id/en/foreign-minister-release-the-team-of-humanitarian-mission-of-indonesia-to-nepal/> pada 20 April 2020 pukul 22.51

⁷² Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020

Dalam menjalankan misi diplomatik di bidang pertahanan, dibutuhkan sinkronisasi antara Duta Besar LBBP sebagai *Head of Mission* dan atase pertahanan sebagai pelaksana. Adanya ketidaksamaan misi yang diemban antara Duta Besar LBBP dengan atase pertahanan membawa dampak negatif dalam upaya pencapaian kepentingan nasional. Penyebab ketidaksinkronan salah satunya adalah seringnya minim koordinasi antara Duta Besar LBBP dengan atase pertahanan dalam menyusun *mission paper* di masing-masing negara. Kesamaan visi antara atase pertahanan dengan Duta Besar LBBP sangat penting dalam menjamin keberhasilan tugas diplomatik. Dengan adanya kesamaan visi tersebut, maka akan mempermudah terciptanya sinergi antar pelaku diplomasi dari berbagai lembaga sehingga kepentingan nasional pun akan semakin mudah tercapai.⁷³

Keberhasilan atase pertahanan Indonesia pun cukup terlihat dalam sejumlah proses diplomasi yang dijalankan. Pada tahun 2018 lalu, Atase Pertahanan RI Marsekal Pertama TNI Joko Takarianto melakukan diplomasi pertahanan dengan Amerika Serikat untuk berkonsultasi mengenai konsep Indo-pasifik dan memperkuat *Maritime Domain Awareness*, serta meresmikan kerja sama antara Boeing dengan PT Dirgantara Indonesia. Melalui upaya diplomasi tersebut, Indonesia dapat mempromosikan sentralitas ASEAN dalam Indo-pasifik, mendapat penguatan kerja sama maritim trilateral antara Amerika-Indonesia-Filipina, serta dapat mendukung pengembangan teknologi dan SDM industri pertahanan di bidang penerbangan.⁷⁴

Sementara itu, Atase Pertahanan RI di China Brigadir Jenderal TNI Kuat Budiman turut mendampingi Menhan Prabowo Subianto dalam melakukan diplomasi bilateral dengan China untuk kepentingan modernisasi alutsista. Demi melancarkan hal tersebut, Menhan bersama

⁷³ Budyanti Putro Sudarsono, Jonni Mahroza, dan Surryanto D.W, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional" *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* Volume 8, No. 3, Desember 2018, Hal 93-94

⁷⁴ Rachmat Fahzry, "Kunjungi Washington, Menhan Perkuat Kerja Sama RI-AS di Bidang Pertahanan" *Okezone*, 30 Agustus 2018. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2018/08/30/18/1943766/kunjungi-washington-menhan-perkuat-kerja-sama-ri-as-di-bidang-pertahanan> pada 21 April 2020 pukul 11.38

Athan Indonesia di China juga mengunjungi *State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense* (SASTIND) untuk melihat potensi kerja sama dengan industri pertahanan Indonesia di masa yang akan datang.⁷⁵

Sementara itu, pada tahun 2019 yang lalu Indonesia juga sepakat meningkatkan kerja sama pertahanan melalui forum bertajuk *Joint Defence Cooperation Dialogue* (JDCCD). Forum tersebut adalah implementasi MoU yang disepakati tahun 2012. Salah satu isu yang dibahas dalam kerja sama tersebut adalah kerja sama pendidikan intelijen, penguatan kerja sama maritim, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, penanggulangan terorisme, serta operasi perdamaian dunia. Kemudian, atase pertahanan RI di Afrika. Kerja sama ini sendiri diwadahi dalam Satgas Pembangunan Infrastruktur Indonesia-Afrika. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua Satgas menginisiasi kerja sama pertahanan mendasar seperti pengadaan seragam militer dan perdagangan alutsista.⁷⁶ Terakhir, atase pertahanan di Australia juga memperkuat di bidang maritim. Kerja sama tersebut akan menawarkan pertukaran informasi dan intelijen dalam menghadapi *illegal fishing* dan kejahatan transnasional di perairan kedua negara.⁷⁷

Akan tetapi, masih terdapat kendala, tantangan, dan hambatan yang ditemukan dalam menjalin kemitraan strategis terkait diplomasi pertahanan. **Pertama**, skala prioritas dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan kurang fokus. Sejak menjabat sebagai Menteri, Prabowo mengunjungi beberapa negara seperti yang sudah disebutkan dan menjalin kerja sama yang cukup sama antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam bekerja sama dengan negara maju, Prabowo

⁷⁵ Muhammad Iqbal, "Top! Modernisasi Pertahanan RI, Prabowo Terbang ke China" *CNBC Indonesia*, 16 Desember 2019. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191216113257-4-123330/top-modernisasi-pertahanan-ri-prabowo-terbang-ke-china> pada 21 April 2020 pukul 11.39

⁷⁶ Caesar Akbar, "Luhut Jajaki Kerja Sama Pertahanan dan Kereta Api dengan Afrika" *Tempo*, 21 Agustus 2019. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1238584/luhut-jajaki-kerja-sama-pertahanan-dan-kereta-api-dengan-afrika> pada 21 April 2020 pukul 11.57

⁷⁷ "Indonesia-Australia Sepakati Kerjasama Keamanan Maritim" *Kemhan*, 6 Desember 2019. Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/2019/12/06/indonesia-australia-sepakati-kerjasama-keamanan-maritim.html> pada 21 April 2020 pukul 11.56

memfokuskan pada kerja sama industri pertahanan dan alutsista. Sementara dalam kunjungannya ke negara berkembang dan negara tetangga, Prabowo memfokuskan pada kerja sama penanggulangan terorisme.

Kunjungan Prabowo pun bertentangan dengan pendapat ilmiah. Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas mengatakan bahwa diplomasi pertahanan harus memiliki sasaran dan pilihan tertinggi. Dalam tulisannya, keduanya menyarankan Indonesia untuk memfokuskan diplomasi pertahanan di tingkat global dengan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Indonesia telah ditempatkan pada skala prioritas tertinggi oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari kontra terorisme global dan kehadirannya di wilayah Asia-Pasifik. Terlepas dari Amerika Serikat, keduanya juga mengatakan Indonesia harus selektif dalam memilih mitra mana yang pantas dan cocok dalam menerapkan makna diplomasi Indonesia.⁷⁸

Kedua, diplomasi pertahanan belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan pertahanan negara, khususnya untuk peningkatan CBM, kapabilitas pertahanan, dan industri pertahanan. Dalam pelaksanaannya, diplomasi pertahanan di Indonesia bersifat cukup kontradiktif dengan berbagai prioritas, utamanya dalam bidang industri pertahanan. Menhan Prabowo Subianto menyebut salah satu target pencapaian pertahanan pada tahun 2024 adalah kemandirian alutsista TNI, dimana hampir seluruh komponen alutsista Indonesia diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.⁷⁹ Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo belum mengarah ke arah tersebut. Prabowo membahas industri pertahanan, tetapi umumnya modernisasi dilakukan dengan cara mengimpor.

Impor alutsista yang dilakukan oleh Prabowo tentu tidak sejalan dengan keinginannya untuk mewujudkan kemandirian dalam pengadaan

⁷⁸ Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas, "Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI" *Jurnal Pertahanan* Volume 4, Nomor 2, Agustus 2014, Hal 170-171

⁷⁹ Endri Kurniawati, "Menhan Prabowo Optimistis Kemandirian Alutsista dalam Negeri" *Tempo*, 3 Desember 2019. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1279495/menhan-prabowo-optimistis-kemandirian-alutsista-dalam-negeri> pada 21 April 2020 pukul 19.39

alutsista. Apalagi, impor yang dilakukan oleh Prabowo tidak dilengkapi ketentuan untuk melakukan transfer teknologi sehingga belum tentu setiap impor dan kerja sama yang dilakukan menguntungkan bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Beberapa langkah positif memang sudah dilakukan seperti memproduksi alutsista bersama, misalnya Tank kelas menengah bersama Turki. Akan tetapi, alutsista tersebut sendiri sudah bisa diproduksi sendiri oleh industri pertahanan dalam negeri sehingga kurang berdampak bagi kemandirian alutsista.

Permasalahan tersebut bisa dijawab dengan kerangka teori dan perundang-undangan terkait. **Pertama**, belum adanya skala prioritas bisa dijawab dengan Teori Manajemen, dimana salah satu langkahnya adalah perencanaan.⁸⁰ Pemilihan mitra strategis yang tepat seharusnya menjadi bagian dari perencanaan diplomasi pertahanan. Oleh karena itu, sebelum Menhan melakukan kunjungan kerja ke berbagai negara dan industri pertahanan, ada baiknya pemilihan mitra dilakukan secara selektif dan dilakukan dengan memfokuskan ke beberapa negara saja, tidak ke beberapa negara seperti yang sudah dilakukan. Selektivitas mitra juga akan memudahkan Indonesia untuk mengidentifikasi lingkungan strategis dalam berbagai urusan pertahanan di masa depan.

Kedua, belum searahnya kebijakan pertahanan dengan pelaksanaan diplomasi pertahanan juga bisa diselesaikan dengan Teori Manajemen. Selain perencanaan, langkah kedua yang dilakukan adalah pengorganisasian.⁸¹ Dalam melaksanakan diplomasi pertahanan, kedua langkah tersebut penting agar diplomasi pertahanan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hal teori tersebut, Kemhan seharusnya melakukan perencanaan dan pengorganisasian dalam melakukan diplomasi pertahanan. Misalkan, melakukan impor dari negara maju untuk alutsista yang tidak mampu diproduksi sendiri tetapi tetap memasukkan ketentuan untuk melakukan transfer teknologi di masa depan.

⁸⁰ Griffin, *Op.Cit*

⁸¹ Griffin, *Op.Cit*.

Kemudian, perlu diperhatikan bahwa kemitraan strategis dalam diplomasi pertahanan harus sesuai dengan prinsip hubungan luar negeri yang menjadi komitmen Indonesia. Dalam pertimbangan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, disebutkan bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip bebas aktif. Hal ini menjadi penegas bagi pola kemitraan strategis yang dijalankan tersebut, sehingga sejatinya merupakan bagian dari hubungan luar negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia

15. Sinergi Antar Institusi Dalam Mengawal Diplomasi Pertahanan.

Pelaksanaan diplomasi pertahanan harus disertai dengan sinergi di antara sejumlah Kementerian/Lembaga serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Sinergi diperlukan untuk menyamakan berbagai kepentingan yang ada di antara para aktor tersebut, baik dari kepentingan diplomatis, kepentingan hankam, hingga kepentingan ekonomi. Selain itu, sinergi juga penting untuk mewujudkan kohesi antar para aktor diplomasi pertahanan, sehingga tidak ada kebijakan atau langkah yang *overlap* dibanding para aktor lainnya.

Aktivitas diplomasi pertahanan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dalam negeri. Beberapa institusi utama yang berperan dalam proses diplomasi pertahanan antara lain adalah: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan TNI. Beberapa pihak lainnya yang juga berkepentingan dalam proses diplomasi pertahanan adalah pihak industri pertahanan baik milik negara maupun swasta, serta lembaga-lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam misi-misi diplomatik Indonesia, umumnya untuk misi kemanusiaan. Selain itu, diplomasi pertahanan juga dapat dijalankan dengan mengadopsi pertimbangan berbagai pakar dan ahli, baik yang berada di perguruan tinggi, maupun yang berada di K/L dan terkait di bidang intelijen dan pertahanan.

Seluruh institusi maupun aktor yang terlibat dalam proses diplomasi pertahanan antara lain Kemhan, Kemlu, Industri Pertahanan, hingga TNI, harus diikat oleh satu kepentingan, yakni kepentingan nasional. Hal ini seringkali menjadi kondisi dilematis, karena misalnya ada perbedaan visi

antar kementerian/lembaga, adanya usaha untuk terus meraih keuntungan dari pihak perusahaan atau industri, maupun rekomendasi idealis dari para pakar yang tidak menghasilkan solusi operasional untuk mengatasi permasalahan di bidang diplomasi pertahanan. Jika sinergi tidak terbentuk, maka diplomasi pertahanan akan berjalan tidak maksimal dan akan berpengaruh pada melemahnya ketahanan nasional.

Jika ditinjau dari peran dan fungsinya selama ini, Kementerian Luar Negeri bertugas untuk memberikan pertimbangan maupun pengesahan politik dalam melakukan diplomasi pertahanan. Pertimbangan diperlukan karena diplomasi pertahanan adalah sub sistem dari diplomasi yang dimotori oleh Kemlu, sementara pengesahan dibutuhkan karena setiap perjanjian internasional yang telah dihasilkan harus diratifikasi oleh DPR.⁸² Jika ditinjau dari UU Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, disebutkan bahwa menteri yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri adalah Menlu. Akan tetapi, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu. Oleh karena itu, sinergi dalam diplomasi pertahanan harus dibangun utamanya antara Kemlu dan Kemhan sebagai instansi pemerintahan yang menaungi hal tersebut.

Dalam pelaksanaan diplomasi tersebut, terdapat serangkaian proses yang harus dilalui oleh Kemlu hingga tercapainya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dengan negara mitra. Tahapan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni tahapan pra-negosiasi, tahapan negosiasi, serta tahapan pasca-negosiasi. Dalam tahapan pra-negosiasi, Kemlu bersama lembaga terkait menyusun perencanaan strategis mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam perundingan dengan negara lain. Sementara itu, tahapan negosiasi berisi perundingan teknis mengenai diplomasi pertahanan, baik untuk tujuan kemanusiaan, pembelian senjata, maupun perundingan strategis. Sementara itu,

⁸² Anwar, *Op.Cit*, Hal 85

tahapan pasca-negosiasi berisi tahapan penandatanganan MoU atau nota kesepakatan lainnya, implementasi kesepakatan, hingga evaluasi.

Selain itu, ada pula peran Kementerian Pertahanan dalam mendukung proses diplomasi pertahanan. Secara khusus, dapat dicermati peran Direktorat Kerjasama Internasional (Ditkersinhan) dan Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan (Dit Tekindhan). Ditkersinhan memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diplomasi pertahanan yang meliputi kerja sama bilateral, multilateral, pendidikan, dan perizinan, serta koordinasi atase pertahanan.⁸³ Sementara itu, Dit Tekindhan memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi serta industri pertahanan.⁸⁴ Ditkersinhan dan Dit Tekindhan keduanya berada di bawah Kemhan tetapi pada Ditjen yang berbeda, yaitu Ditkersinhan di bawah Dirjen Strahan dan Dit Tekindhan berada dibawah Dirjen Pothan.

Kemudian, TNI juga memiliki peran dalam memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia, khususnya melalui keberadaan Pusat Kerjasama Internasional TNI (Puskersin TNI). Puskersin TNI bertugas dalam merumuskan kebijakan dan mengorganisasikan kegiatan kerja sama internasional di lingkungan TNI. Bidang kerjanya pun cukup banyak, mencakup beberapa hal seperti perjanjian, kerja sama ASEAN, kerja sama non-ASEAN, evaluasi data dan informasi, protokol dan kunjungan, serta kelompok ahli. Puskersin baru dibentuk pada tahun 2013 dan bertanggung jawab pada Panglima TNI.⁸⁵ Hal ini pula yang dijelaskan di dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, bahwa TNI dapat melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan.

⁸³ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Pasal 345

⁸⁴ "Tugas dan Fungsi Dit Tekindhan" *Kemhan*. Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/pothan/tugas-dan-fungsi-dit-tekindhan> pada 21 April 2020 pukul 21.55

⁸⁵ "Profil Puskersin TNI" *PPID TNI*, 30 Agustus 2016. Diakses melalui <https://ppid.tni.mil.id/view/32435636/profil-puskersin-tni.html> pada 21 April 2020 pukul 22.10

Selain menyoroti mengenai pemerintah melalui kementerian dan lembaga, diplomasi pertahanan juga memerlukan peran maksimal dari mitra pemerintah yakni DPR. DPR dan Pemerintah harus menyamakan visi dan persepsi dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan. Visi yang sama diharuskan untuk mencapai kepentingan nasional di forum internasional baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sementara itu, kesamaan persepsi juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa DPR dan Pemerintah melihat mitra, pesaing, hingga forum internasional dengan cara yang sama sehingga akan muncul skala prioritas dalam melakukan diplomasi pertahanan.

Setelah mendapatkan persetujuan dan pertimbangan dari DPR, maka Pemerintah bisa melaksanakan diplomasi pertahanan yang mengutamakan kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, diplomasi pertahanan perlu diawasi secara berkala dan mendalam oleh Komisi I sebagai komisi yang menjadi mitra Kemhan dan Kemlu. Hal ini penting agar pelaksanaan diplomasi pertahanan tetap berada di jalur yang tepat selama penerapannya.

Akan tetapi, masih terdapat berbagai hambatan, tantangan, dan kendala dalam memaksimalkan kemitraan strategis dalam diplomasi pertahanan. **Pertama**, kebijakan diplomasi pertahanan saat ini masih mendapatkan kritik oleh DPR. Hal ini terkait dengan kunjungan Menhan Prabowo ke beberapa negara sehingga dianggapkan menghabiskan biaya kunjungan kerja. Prabowo sendiri menyangkal dengan mengatakan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan adalah bagian dari diplomasi pertahanan yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari alutsista yang ada di negara maju sekaligus menjalin hubungan baik dengan negara lain.⁸⁶ Adanya kritik terhadap kinerja Pemerintah memang wajar, tetapi kritik salah satu fraksi tersebut kurang membangun dan malah terkesan menyalahkan.

⁸⁶ Nur Azizah Rizki Astuti, "Dikritik PKS Sering Kunker, Prabowo Bicara Kebutuhan Keliling Dunia" *Detik*, 20 Januari 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4866480/dikritik-pks-sering-kunker-prabowo-bicara-kebutuhan-keliling-dunia> pada 21 April 2020 pukul 23.35

Kedua, belum adanya indikator keberhasilan dalam diplomasi pertahanan sehingga sulit untuk kesuksesannya sulit untuk diukur. Secara praktis, satu-satunya indikator keberhasilan dalam melakukan diplomasi pertahanan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan nasional. Akan tetapi, definisi tersebut terlalu luas untuk dijadikan indikator apalagi dampaknya belum tentu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Secara saintifik, Bappenas mengatakan diplomasi dalam berbagai bidang sulit untuk diukur pencapaiannya karena belum adanya indikator yang dipilih untuk mengukurnya. Sementara itu, pandangan lainnya mengatakan bahwa diplomasi utamanya di bidang pertahanan adalah investasi besar yang dampak pengembaliannya akan terasa dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan tidak terasa sama sekali.⁸⁷ Absennya indikator menyebabkan kesulitan untuk menilai apakah diplomasi pertahanan berhasil atau tidak.

Ketiga, perangkat aturan dan dukungan anggaran kurang memadai. Dari segi regulasi, belum ada turunan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sehingga koordinasi antar lembaga hanya difasilitasi melalui Surat Kesepakatan Bersama (SKB). Selain itu, anggaran pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia juga belum sebesar negara maju sehingga menimbulkan hambatan-hambatan untuk melakukan diplomasi pertahanan. Misalnya, Indonesia tidak memiliki program *military aid* belum mampu untuk memenuhi kebutuhan anggaran pertahanan negara untuk urusan eksternal.⁸⁸ Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR perlu menyusun kerangka regulasi dan pendanaan yang memadai agar diplomasi pertahanan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ketiga masalah tersebut dapat dijawab dengan Teori Manajemen. Teori Manajemen menyebutkan empat tahapan/langkah dalam proses manajemen untuk mewujudkan kinerja yang berkualitas, yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Kritik berlebihan anggota DPR kepada Menhan Prabowo menunjukkan

⁸⁷ "Kajian Penyusunan Konsep Indeks Diplomasi Indonesia, Tahap I' Kementerian PPN/Bappenas, Hal 56

⁸⁸ Sudarsono *et.al*, *Op.Cit*, Hal 99

kelemahan dalam proses pengorganisasian karena DPR belum memahami esensi dari diplomasi pertahanan. Belum adanya indikator keberhasilan diplomasi pertahanan menunjukkan bahwa aspek pengendalian dan pengawasan perlu disempurnakan agar memasukkan indikator tersebut. Terakhir, belum tersedianya perangkat aturan dan anggaran menunjukkan bahwa perencanaan diplomasi pertahanan belum matang. Oleh karena itu, perlu dibangun sinergi antar lembaga maupun antar Pemerintah dan DPR berdasarkan Teori Manajemen agar pelaksanaan diplomasi pertahanan bisa menjadi lebih optimal.

16. Perencanaan Kebijakan Nasional di Bidang Diplomasi Pertahanan.

Perencanaan kebijakan nasional di bidang diplomasi pertahanan dapat merujuk pada RPJMN 2020-2024. Salah satu tujuan dalam RPJMN adalah menjaga stabilitas keamanan nasional. Beberapa hal yang terkait dengan diplomasi pertahanan antara lain adalah mewujudkan keamanan laut yang terbebas dari ancaman kejahatan tradisional dan transnasional, serta terpenuhinya kekuatan pokok minimum (MEF). Dalam mewujudkan keamanan laut, Indonesia tidak bisa bertindak sendiri karena terkait dengan kapal dan wilayah laut negara lain, apalagi ditengah kehadiran kejahatan transnasional. Kemudian, dalam memenuhi Kekuatan Pokok Minimum Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan diri sendiri, apalagi dengan kondisi industri pertahanan yang belum optimal.

Dalam bidang diplomasi, kebijakan nasional yang diimplementasikan harus melewati tahapan perencanaan. Menurut Tjokroamidjojo, perumusan kebijakan merupakan pemilihan alternatif terbaik yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai untuk menyelesaikan permasalahan. Alternatif-alternatif penanganan tersebut dapat berkembang melalui pengembangan maupun sintesis seiring dengan perkembangan masalah tersebut.⁸⁹ Oleh karena itu, dalam bidang diplomasi pertahanan, perencanaan kebijakan berarti memilih alternatif

⁸⁹ Faranudia Julfirdana, "Proses Perencanaan Kebijakan Anggaran dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun" *Tugas Akhir Program Magister Universitas Terbuka*, 2017, Hal 10

terbaik melalui pengembangan maupun sintesis untuk mengatasi berbagai masalah dalam bidang diplomasi pertahanan.

Perencanaan kebijakan nasional di bidang diplomasi pertahanan harus dilakukan secara visioner agar diplomasi pertahanan memiliki visi jangka panjang yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Kemampuan visioner dalam menyusun perencanaan juga akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memprediksi dan mengantisipasi dinamika lingkungan strategis khususnya di bidang pertahanan, sehingga Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk membaca situasi dan unggul dalam melakukan diplomasi pertahanan.

Keberhasilan perencanaan kebijakan bergantung kepada beberapa faktor internal seperti demografis, kultur sosial-politik dan kondisi internal di dalam negeri. Sementara itu, secara eksternal perencanaan kebijakan harus mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis untuk menunjang efektivitas kebijakan tersebut.⁹⁰ Jika dikaitkan dengan diplomasi pertahanan, maka keberhasilan perencanaan kebijakan perlu memperhatikan faktor demografis, kultur politik luar negeri dan kondisi ekonomi serta pertahanan. Selain itu, diplomasi pertahanan perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis di tingkat bilateral, regional, maupun global.

Diplomasi pertahanan dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah *Confidence Building Measure* (CBM). Melalui CBM, akan terbangun keyakinan dan rasa saling percaya antar negara atas perkembangan situasi yang terjadi. CBM dapat diraih melalui keterbukaan atas akses informasi untuk memperkuat rasa percaya antara kedua negara sebagai tingkatan tertinggi unit dalam sistem internasional. CBM penting untuk dilakukan utamanya di tingkat regional karena posisinya berdekatan dengan geografis serta disatukan dalam institusi regional yang kuat sehingga perlu kepercayaan yang kuat antar negaranya.⁹¹ Untuk mewujudkan perencanaan di bidang CBM, DPR

⁹⁰ *Ibid*, Hal 2

⁹¹ Yoshua Parulian, Hari Utomo, Yusnaldi, "Analisis Confidence Building Measures (CBMs) Terhadap Kerja Sama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia dengan Singapura" *Jurnal Keamanan Maritim* Vol. 4, No. 3, 2018, Hal 93-94

menghendaki Pemerintah sebagai eksekutor utama politik luar negeri untuk bekerja sama dengan lebih mendalam melalui ASEAN. Indonesia perlu mendorong ASEAN untuk menjaga sentralitasnya dalam mengelola persoalan kawasan tanpa tunduk pada kekuatan besar tertentu.⁹²

Hal ini pula yang menjadi kandungan penting dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip bebas aktif. Selain itu, pada UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, juga disebutkan bahwa Menteri Pertahanan dapat menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya, dalam hal ini di bidang pertahanan.

Tujuan lain dari diplomasi pertahanan adalah untuk meningkatkan *defence capability* atau kapabilitas pertahanan. Kapabilitas pertahanan adalah kemampuan untuk menggelar pertahanan secara efektif. Kapabilitas pertahanan dinilai dari beberapa aspek seperti personel, organisasi, latihan kolektif, sistem kerja, fasilitas pendukung, dukungan dari pihak lain, serta manajemen dan struktur komando.⁹³ Dalam perencanaan bidang pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa amanat DPR selaku mitra pemerintah. DPR menghendaki adanya reformasi militer⁹⁴ dan modernisasi alutsista TNI.⁹⁵ Kedua hal tersebut penting untuk meningkatkan ketangguhan militer Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka *Minimum Essential Force* (MEF) untuk memenuhi kekuatan pokok minimum alutsista Indonesia. MEF sendiri sudah diimplementasikan sejak 2009 dan dibagi ke dalam tiga tahapan.⁹⁶

⁹² Perimbangan Kekuatan Pasca Penghentian Kerja Sama Pertahanan Amerika Serikat-Filipina” *Puslit DPR* Vol. XII, No. 4, Februari 2020

⁹³ “Defence Capability Development Manual” *Australian Government*, 2006, Hal 3

⁹⁴ Budiarti Putri, “Revisi UU TNI Masuk Prolegnas, Aktivis Desak Reformasi Militer” *Tempo*, 25 Januari 2020. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1299587/revisi-uu-tni-masuk-prolegnas-aktivis-desak-reformasi-militer> pada 22 April 2020 pukul 11.26

⁹⁵ “Komisi I Dorong TNI-Kemenhan Modernisasi Alutsista Korps Marinir” *DPR*, 10 Desember 2019. Diakses melalui <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26876/t/Komisi+I+Dorong+TNI-Kemenhan+Modernisasi+Alutsista+Korps+Marinir> pada 22 April 2020 pukul 11.27

⁹⁶ “Kebijakan Modernisasi Alutsista Laut Berbasis MEF Tahap III” *PAL*, 30 Oktober 2019. Diakses melalui <http://pal.co.id/publikasi/artikel/1037> pada 22 April 2020 pukul 11.24

Terakhir, diplomasi pertahanan juga bertujuan untuk meningkatkan industri pertahanan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kemampuan gelar pertahanan suatu negara. Industri pertahanan perlu dikembangkan untuk menumbuhkan daya saing dan sekaligus menimbulkan efek daya gentar bagi militer Indonesia. Diplomasi pertahanan untuk meningkatkan industri pertahanan selama ini dilakukan dengan menawarkan produk Indonesia kepada negara-negara mitra, sekaligus memproduksi bersama suatu produk sehingga mempermudah transfer teknologi.⁹⁷ Sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang, kemandirian alutsista melalui industri pertahanan juga sudah dibahas dan menjadi tujuan Menhan Prabowo hingga tahun 2024.⁹⁸

Berbagai langkah diplomasi pertahanan yang telah dijalankan oleh Menhan dengan banyak negara sesungguhnya dapat menjadi pembuka jalan, untuk memajukan industri pertahanan nasional agar lebih berdaya saing. Apalagi nilai ekspor industri pertahanan Indonesia belum cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ekspor industri pertahanan Indonesia 2015-2018 masih bergantung kepada PT. Dirgantara Indonesia dari sektor penerbangan. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1 Ekspor Industri Pertahanan Indonesia

No	Produksi	Komoditi Ekspor	Negara Tujuan	Nilai Ekspor
1	PT. Dirgantara Indonesia	Pesawat Angkut CN-235 Pesawat Angkut NC-212	Senegal Vietnam Thailand	161 Juta US\$
2	PT. PAL	Strategic Sealift Vessels LPD-122mm	Filipina	86,9 Juta US\$
3	PT. Pindad	Senapan & Amunisi Ranpur Anoa	ASEAN Afrika Arab Saudi Korsel Timor Leste Nigeria	32,6 Juta US\$
4	PT. Lundin	Small Patrol Craft Sea Rider	Swedia Rusia	3,6 Juta US\$

Jika dinilai secara keseluruhan, diplomasi pertahanan Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi positifnya, Indonesia cukup

⁹⁷ Dahnil Anzar Simajuntak, "Memperkuat Diplomasi Pertahanan" *Jawa Pos*, 3 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.jawapos.com/opini/03/02/2020/memperkuat-diplomasi-pertahanan/> pada 22 April 2020 pukul 11.44

⁹⁸ Kurniawati, *Op.Cit*

mampu untuk menggalang CBM antar negara-negara Asia Tenggara, terutama dengan mengasimilasi kepentingan antara negara-negara ASEAN dengan beberapa negara *great powers*, dalam sentralitas mengenai konsep Indo-Pasifik. Peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN sangat penting, khususnya untuk mendukung CBM dengan negara Asia Tenggara dan negara *great powers* yang berpengaruh di Asia Tenggara. Apalagi negara-negara tersebut melihat Indonesia sebagai mitra yang strategis dalam lingkup regional.

Diplomasi pertahanan juga memiliki pengaruh terhadap ketahanan nasional karena diplomasi pertahanan dalam sistem keamanan nasional tidak sebatas sebagai upaya untuk menghadapi dimensi ancaman militer saja. Namun, juga memperhitungkan juga dimensi ekonomi, politik, sumber daya alam, lingkungan, dan kependudukan. Untuk lebih membahas pengaruhnya terhadap ketahanan nasional, maka dapat disandingkan dengan konsep Astagatra ketahanan nasional.

Dari sisi geografis, diplomasi pertahanan harus dilakukan dengan maksimal karena Indonesia memiliki posisi yang strategis di antara negara-negara *great powers*, dan oleh karenanya Indonesia harus mempertahankan integritas teritorialnya.⁹⁹ Secara demografis, Indonesia adalah negara demokratis terbesar serta negara berpenduduk muslim terbesar.¹⁰⁰ Hal ini menjadi modal untuk melakukan diplomasi pertahanan yang krusial seperti menjadi penghubung antar negara Islam, antar negara demokratis, maupun dengan menjadi mediator dalam berbagai konflik. Sementara itu, diplomasi pertahanan penting untuk dilakukan dari segi kekayaan alam karena Indonesia adalah tempat perebutan sumber daya alam, terutamanya sumber daya maritim.¹⁰¹

⁹⁹ Li Jiacheng, "Developing China's Indian Ocean Strategy" *China Quarterly of International Strategic Studies* Vol.3, No.4, 2017, 481-497

¹⁰⁰ Ilham, "Indonesia Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia" *Tempo*, 2 Desember 2011. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia/full&view=ok> pada 22 April 2020 pukul 12.01

¹⁰¹ Serafica Gischa, "Potensi Sumber Daya Maritim Indonesia" *Kompas*, 22 April 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/22/113659269/potensi-sumber-daya-maritim-indonesia> pada 22 April 2020 pukul 12.03

Kemudian, diplomasi pertahanan harus dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan yang dianut, utamanya adalah politik luar negeri bebas aktif. Dalam bidang politik, diplomasi pertahanan juga wajib mempraktekkan politik yang bebas aktif dan konstruktif terhadap pencapaian tujuan nasional. Dalam bidang ekonomi, diplomasi pertahanan juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekspor industri pertahanan sebagai tujuan utama. Terakhir, diplomasi pertahanan juga tidak lepas dari faktor sosial budaya karena budaya menjadi identitas dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi *bargaining position* dalam bernegosiasi dengan negara lain.

Akan tetapi, masih terdapat berbagai hambatan, tantangan, dan kendala dalam perencanaan diplomasi pertahanan. **Pertama**, belum adanya *roadmap* atau *grand design* spesifik dalam bidang diplomasi pertahanan. Belum adanya *roadmap* menjadi masalah karena perencanaan diplomasi pertahanan tidak dilakukan secara visioner, melainkan masih secara reaktif dan sangat bergantung kepada lingkungan strategis tersebut. Selain itu, absennya *roadmap* juga terkait dengan minimnya indikator untuk menentukan kesuksesan dari diplomasi pertahanan sehingga pengendalian pengawasan yang dapat dilakukan cukup minim dalam menilai kesuksesan diplomasi pertahanan itu sendiri.

Kedua, aktor-aktor negara yang bertanggung jawab dalam perencanaan nasional di bidang diplomasi pertahanan belum berkontribusi secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan visi dan persepsi mengenai pengelolaan diplomasi pertahanan yang baik dan benar, utamanya perbedaan antara Pemerintah dan DPR. Salah satu konflik tercermin antara anggota DPR dengan Menhan mengenai pembahasan anggaran kementerian pertahanan. Padahal, Menhan Prabowo Subianto menghendaki penilaian, kesepakatan, dan pengalaman sebelumnya bahwa anggaran pertahanan dan rapat kerja kementerian ditutup tanpa kehadiran media. Hal ini krusial agar pihak di

luar Indonesia tidak mengetahui rincian anggaran pertahanan.¹⁰² Konflik antar aktor tersebut menyebabkan kontribusinya menjadi tidak optimal.

Ketiga, aktor-aktor non negara kurang dilibatkan dalam perencanaan diplomasi pertahanan. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan rapat kerja kementerian pertahanan yang diadakan secara tertutup. Padahal, kehadiran para akademisi maupun LSM dibutuhkan untuk memberikan cara pandang lain yang lebih aktual dan teoritis mengenai diplomasi pertahanan. Penelitian juga menyebutkan bahwa partisipasi sipil dibutuhkan dalam urusan bidang pertahanan dan keamanan karena sipil memiliki kemampuan pengetahuan dan teknologi yang lebih komprehensif dibanding para aktor negara. Salah satu kontribusi aktor non-negara adalah memberikan pengetahuan terkini mengenai teknologi pertahanan dan dinamika lingkungan strategis, misalnya dalam berkontribusi terhadap inovasi pertahanan.¹⁰³

Ketiga permasalahan tersebut juga dapat dijawab dengan Teori Manajemen. Absennya *roadmap* dan *grand-design* dalam melakukan diplomasi pertahanan menunjukkan kekurangan dari aspek perencanaan yang akan mempersulit aspek pengendalian. Hal ini dikarenakan para pejabat tidak memiliki indikator kesuksesan dalam melakukan diplomasi pertahanan. Kemudian, kontribusi aktor yang belum optimal juga dipengaruhi oleh perencanaan yang belum matang. Salah satu aspek penting dalam perencanaan adalah menyamakan visi, suatu langkah penting yang harus dilakukan dalam memaksimalkan kontribusi aktor. Terakhir, keterlibatan aktor non-negara juga diperlukan dalam rangka membangun pelaksanaan diplomasi pertahanan yang optimal. Aktor non-negara diharapkan memberi pengetahuan tambahan pada pemangku kebijakan untuk menjawab berbagai permasalahan diplomasi pertahanan.

¹⁰² "Prabowo Heran Fraksi PDIP Minta Rincian Anggaran Kemenhan" *CNN Indonesia*, 11 November 2019. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191111135556-32-447300/prabowo-heran-fraksi-pdip-minta-rincian-anggaran-kemenhan> pada 22 April 2020 pukul 12.34

¹⁰³ Luerzi Marisa dan Hizra Marisa, "Partisipasi Sipil dalam Inovasi Militer: Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Turki 2010-2018" *Jurnal Global Strategis*, Th. 13, No. 2, 2019, Hal 18-29

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Diplomasi pertahanan merupakan langkah strategis yang perlu diperkuat, untuk mencapai tujuan nasional dan melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia dalam suatu tatanan hubungan internasional. Dalam pelaksanaannya, diplomasi pertahanan memiliki peran untuk: 1) meningkatkan *Confidence Building Measures (CBM)*, 2) meningkatkan kapabilitas pertahanan (*defense capability*), dan 3) Memperkuat industri pertahanan (*defense industry*).
- b. Berkenaan dengan kajian yang pertama, dinamika lingkungan strategis telah menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis di antara dua *great powers* (AS dan China). Hal ini harus dihadapi dengan kurang siapnya Indonesia dalam memprediksi potensi ancaman dan lingkungan strategis, serta belum optimalnya CBM yang dijalankan. Oleh karena itu hal ini harus disikapi dengan kebijakan Indonesia untuk melakukan *hedging* antara AS dan China, dalam usaha untuk menyeimbangkan posisi Indonesia di antara kedua negara adidaya tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus memanfaatkan sentralitas ASEAN sebagai upaya untuk memperkuat CBM, serta dengan memberdayakan institusi atau komunitas yang sudah terbentuk seperti *ASEAN Political Security Community (APSC)* dan *ASEAN Regional Forum (ARF)*.
- c. Tantangan kedua adalah mengenai kemitraan strategis dalam mendukung diplomasi pertahanan. Indonesia dinilai masih belum fokus dalam skala prioritas pelaksanaan diplomasi pertahanan. Selain itu, diplomasi pertahanan Indonesia yang dijalankan masih belum sejalan dengan kebijakan pertahanan negara. Oleh karena itu, harus dipahami terlebih dahulu secara utuh aplikasi dari politik

luar negeri bebas aktif dalam perspektif hubungan internasional, serta disandingkan dengan tujuan pertahanan negara. Dengan demikian diplomasi pertahanan yang dijalankan harus berfokus untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan diplomasi pertahanan perlu direncanakan secara matang, seperti menyeleksi negara mitra ataupun aliansi pertahanan yang akan dipilih, serta diorganisasikan secara cermat dan sinergis agar diplomasi pertahanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

d. Hal ini selanjutnya akan terkait dengan tantangan ketiga, yaitu sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengawal diplomasi pertahanan. Tantangan ini harus direspon mengingat masih terjadinya mispersepsi antara Pemerintah (Kemhan) dan DPR terkait kebijakan diplomasi pertahanan melalui kunjungan ke banyak negara, serta belum ada indikator keberhasilan untuk mengukur efektivitas diplomasi pertahanan yang telah dijalankan. Selain itu, perangkat aturan turunan dan dukungan anggaran untuk meningkatkan peran diplomasi pertahanan juga masih kurang memadai. Oleh karena itu, proses *checks and balances* yang dijalankan dalam menyikapi fokus diplomasi pertahanan saat ini hendaklah dilakukan secara konstruktif, yakni dengan membangun kesamaan persepsi antara Pemerintah dengan DPR, termasuk dalam hal penyempurnaan regulasi dan penyediaan anggaran yang lebih memadai. Selain itu, harus diperkuat pula sinergi dengan *stakeholders* lain seperti: unsur industri pertahanan dan kalangan *civil society*, sehingga dapat dihasilkan indikator keberhasilan yang lebih terukur dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan.

e. Terakhir, terdapat tantangan yang terkait dengan perencanaan kebijakan nasional di bidang diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan Indonesia masih belum memiliki *roadmap* dan *grand design* yang bervisi jangka panjang. Hal ini tercermin dari peran aktor-aktor negara maupun aktor non-negara yang belum berkontribusi optimal, untuk mempersiapkan perencanaan strategis di bidang diplomasi pertahanan. Oleh karena itu, harus dijalankan

suatu perencanaan terpadu untuk merumuskan *roadmap* dan *grand design* di bidang diplomasi pertahanan, yang dirancang secara komprehensif, partisipatif, visioner dan menggunakan perspektif multidimensional. Dengan mengatasi berbagai tantangan di atas, maka peningkatan peran diplomasi pertahanan akan mampu mendukung penguatan Ketahanan Nasional.

18. Rekomendasi.

Berdasarkan uraian Simpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Kemenko Polhukam melalui Kemlu dan Kemhan perlu menjalankan *Strategic Engagement* dalam kebijakan diplomasi pertahanan, yakni dengan mengirimkan langsung figur-figur sentral sebagai pengambil keputusan saat menjalankan misi diplomatik ke negara-negara strategis.
- b. Kemhan dan Mabes TNI perlu membentuk Korps Diplomatik melalui langkah re-organisasi, yang secara khusus ditujukan untuk mempersiapkan para perwira mulai dari jenjang Perwira Pertama agar nantinya dapat menjalankan misi-misi diplomasi pertahanan. Dalam prosesnya, pendidikan dan penyiapan Korps Diplomatik ini dapat bermitra dengan Kemlu melalui program diklat Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu).
- c. Kemlu, Kemhan, dan Kemen BUMN mengaplikasikan strategi paradiplomasi melalui pendayagunaan BUMN-BUMN Strategis untuk mendukung upaya diplomasi pertahanan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia.
- d. Pemerintah melalui Kemlu dan Kemhan perlu memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan negara mitra yang memiliki *defense capability* dan *defense industry* cukup kompetitif (seperti India dan Korsel), sebagai wujud diplomasi pertahanan dalam menyikapi dinamika lingkungan strategis agar tidak terjebak dalam hegemoni dua negara adidaya (AS dan China).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

ASEAN Political Security Community Blueprint, ASEAN, 2009.

Andrew Cottey and Anthony Foster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, London : IISS (2004), 15-17.

Budyanti Putro Sudarsono, Jonni Mahroza, dan Surryanto D.W, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional" *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* Volume 8, No. 3, Desember 2018.

"Defence Diplomacy in Southeast Asia" *RSIS Conference Report*, 30 November 2010.

Direktorat Kerjasama Politik Keamanan ASEAN, *ASEAN Outlook on Indo Pacific* (AOIP), disampaikan pada Diskusi Panel PPRA LX Tahun 2020 Lemhannas RI.

Donald E. Weatherbee, "Indonesia, ASEAN, and the Indo-Pacific Cooperation Concept" *ISEAS Perspective*, No. 47, 7 Juni 2019.

"Defence Diplomacy Plan" *Ministerio de Defensa*, 2019.

"Defence Capability Development Manual" *Australian Government*, 2006.

Faranudia Julfirdana, "Proses Perencanaan Kebijakan Anggaran dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun" *Tugas Akhir Program Magister Universitas Terbuka*, 2017.

Iis Gindarsah, "Indonesia's Defence Diplomacy : Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties" *RSIS Working Paper* No. 293, 9 Juni 2015.

Jim Murphy, "The Need for Defence Diplomacy" *RUSI*, 3 Mei 2012. Diakses melalui <https://rusi.org/commentary/need-defence-diplomacy> pada 19 maret 2020 pukul 18.42.

Jurgen Haacke, "The Concept of Hedging and Its Application to Southeast Asia: A Critique and A Proposal For A Modified Conceptual and Methodological Framework" *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 19, Issue 3, September 2019, 375-417.

Kenneth N. Waltz (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., hlm. 88.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Belanda.

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020.

Kajian Penyusunan Konsep Indeks Diplomasi Indonesia, Tahap I' *Kementerian PPN/Bappenas*, Hal 56.

Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020, Naskah Lembaga Bidang Studi *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2020, Naskah Lembaga Bidang Studi *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX.

Lech Drab, "Defence Diplomacy – An Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State" *Security and Defence Quarterly* Vol. 20, 2018.

Luerzi Marisa dan Hizra Marisa, "Partisipasi Sipil dalam Inovasi Militer: Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Turki 2010-2018" *Jurnal Global Strategis*, Th. 13, No. 2, 2019, Hal 18-29.

Li Jiacheng, "Developing China's Indian Ocean Strategy" *China Quarterly of International Strategic Studies* Vol.3, No.4, 2017, 481-497.

Nick Bisley, "The East Asia Summit and ASEAN : Potential and Problems" *Contemporary Southeast Asia* Vo.39, No.2 (2017).

Perimbangan Kekuatan Pasca Penghentian Kerja Sama Pertahanan Amerika Serikat-Filipina" *Puslit DPR* Vol. XII, No. 4, Februari 2020.

Ricky W. Griffin, *Management*. United States of America : Cengage Learning (2010).

Robert Ayson, "The Importance of Geography" in *Power, Strategy, and Defence Policy* by Desmond Ball and Sheryn Lee. Canberra : ANU Press (2016), halaman 70-71.

Syaiful Anwar, "Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan" *Jurnal Pertahanan* Vol.4, No.2 (2014).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali press, 2002, 242.

See Seng Tan dan Bhubhinder Singh (2012). *Introduction. Asian Security*, vol. 8, no. 3, hlm. 222-225.

Shafiah F. Muhibat, *Tantangan Stabilitas Politik Kawasan Indo Pasifik dan Sinergi Aktor di Kawasan*, Diskusi Panel Politik dan Hubungan Internasional PPRA LX 16 April 2020.

Tim Pokja BS. Strategi, *Materi Pokok Bidang Studi Strategi Tahun 2019*. Jakarta : Lemhanas (2019), hal 73.

Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas, "Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI" *Jurnal Pertahanan* Volume 4, Nomor 2, Agustus 2014, Hal 170-171

Yoshua Parulian, Hari Utomo, Yusnaldi, "Analisis Confidence Building Measures (CBMs) Terhadap Kerja Sama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia dengan Singapura" *Jurnal Keamanan Maritim* Vol. 4, No. 3, 2018, Hal 93-94.

Zbigniew Brzezinski, *Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the US-Soviet Contest*. Boston : The Atlantic Monthly Press (1986), hal 6

Peraturan Perundang-undangan :

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP / 104 / M / I / 2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Pasal 345.

Internet :

"Taktik Prabowo Modernisasi Alutsista TNI: Diplomasi Pertahanan hingga ke 7 Negara" *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/07444881/taktik-prabowo-modernisasi-alutsista-tni-diplomasi-pertahanan-hingga-ke-7?page=all> pada 18 Februari 2020 pukul. 22.17 WIB.

Gery Gugustomo, "Ekspor Industri Pertahanan Indonesia Capai Ratusan Juta Dollar Amerika" *Akurat*, 4 Desember 2018. Diakses melalui <https://akurat.co/ekonomi/id-419257-read-ekspor-industri-pertahanan-indonesia-capai-ratusan-juta-dollar-amerika> pada 6 April 2020 pukul 20.00 WIB.

"Diam-Diam Ekspor Senjata Indonesia Meningkatkan 500%" *Kanal 24*, 28 Desember 2019. Diakses melalui <http://kanal24.co.id/read/diam-diam-ekspor-senjata-indonesia-meningkat-500> pada 16 April 2020 pukul 11.02.

Harya Putra, "Alutsista Indonesia Terkuat ke-1 di ASEAN dan ke-15 di Dunia" *PKP Berdikari*, 1 April 2019. Diakses melalui <https://www.pkpberdikari.id/infografis/alutsista-indonesia-terkuat-pertama-di-asean-dan-ke-15-di-dunia/> pada 6 April 2020 pukul 20.08 WIB.

Dini Nurilah, "Waswas Perang Dunia Ketiga" *Liputan 6*, 28 April 2017. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/2934111/waswas-perang-dunia-ketiga> pada 6 April 2020 pukul 20.17 WIB.

"Defense Primer: Geography, Strategy, and U.S Force Design" *CRS*, 17 Maret 2020. Diakses melalui <https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF10485.pdf> pada 19 Maret 2020 pukul 21.36.

"Korsel Prioritaskan Ekspor Alat Tes Virus Corona Untuk Indonesia Ini Alasannya", diunduh dari <https://news.detik.com/internasional/d-4956595/korsel-prioritaskan-ekspor-alat-tes-virus-corona-untuk-indonesia-ini-alasannya>, diakses pada Jumat 17 April 2020 pk.17.02 WIB

Marina Ika Sari, Leonard Hutabarat, Amarulla Octavian, "Indonesia-India Defense Diplomacy in the Indian Ocean" *Jurnal Pertahanan* Vol. 4, No.2 (2018).

"Forum Regional ASEAN (ARF)" *Kementerian Luar Negeri RI*, 8 April 2019. Diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/126/halaman_list_lainnya/forum-regional-asean-arf pada 6 April 2020 pukul 22.47 WIB.

Hendry Sianturi, "Ini Data Baru Kewilayahan Laut Indonesia" *Gatra*, 10 Agustus 2018. Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/337332-Ini-Data-Baru-Kewilayahan-Laut-Indonesia> pada 6 April 2020 pukul 23.20 WIB.

Yeremia Sukoyo, "Indonesia Jadi Contoh Negara Demokrasi Terbesar di Asia" *Berita Satu*, 3 Oktober 2018. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/politik/514379-indonesia-jadi-contoh-negara-demokrasi-terbesar-di-asia.html> pada 6 April 2020 pukul 23.25 WIB.

Mayjen TNI Purn. Dr. I Gede Sumertha, "Diplomasi Militer dalam Perspektif Historis" *Rakornis Sejarah TNI, April 2018*.

Imarotul Izzah, "Guru Besar Geofisika UB: Kekayaan Maritim Indonesia Banyak yang Belum Tereksplorasi" *Malang Times*, 14 November 2019. Diakses melalui <https://www.malangtimes.com/baca/46205/20191114/165400/guru-besar-geofisika-ub-kekayaan-maritim-indonesia-banyak-yang-belum-terekplorasi> pada 6 April 2020 pukul 23.34.

Yeremia Sukoyo, "Kekuatan Diplomasi Maritim Indonesia Terus Diperkuat" *Berita satu*, 14 November 2019. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/585317/nasional/585317-kekuatan-diplomasi-maritim-indonesia-terus-diperkuat> pada 6 April 2020 pukul 23.36 WIB.

_____, "Jubir Menhan Paparkan Diplomasi Pertahanan Ala Prabowo" *CNBC Indonesia*, 1 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200128160037-8-133383/jubir-menhan-paparkan-diplomasi-pertahanan-ala-prabowo> pada 6 April 2020 pukul 23.42 WIB.

Restu Diantina Putri, "Anggaran Kemenhan Era Menteri Prabowo : Jumbo dan Tertutup" *Tirto*, 26 November 2019. Diakses melalui <https://tirto.id/anggaran-kemenhan-era-menteri-prabowo-jumbo-dan-tertutup-emjK> pada 6 April 2020 pukul 23.49 WIB.

Aria Pradana, "Ekspor Industri Pertahanan Indonesia Capai Rp4 Triliun" *Kumparan*, 26 November 2018. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ekspor-industri-pertahanan-indonesia-capai-rp-4-triliun-1543209940009121424> pada 6 April 2020 pk.23.51.

Wahyu Aji, "Panglima TNI: Diplomasi Pertahanan Alat Penting Kebijakan Keamanan Luar Negeri" *Tribun*, 26 Juni 2014. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/26/panglima-tni-diplomasi-pertahanan-alat-penting-kebijakan-keamanan-luar-negeri> pada 6 April 2020 pukul 23.56 WIB.

Muhammad Iqbal Handewa Putra, "Industri Pertahanan Kalah Nilai Dengan Negara Tetangga: PT Pindad vs ST Kinetics Ltd" *Yonulis*, 21 Desember 2019. Diakses melalui <https://yonulis.com/2019/12/21/industri-pertahanan-kalah-nilai-dengan-negara-tetangga-pt-pindad-vs-st-kinetics-ltd/> pada 20 April 2020 pukul 18.16

Fariha Sulmahati dan Happy Fajrian, "Ekspansi ke Pasar Afrika, Pindad Jajaki Ekspor Alutsista ke Ghana" *Katadata*, 23 Januari 2020. Diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/2020/01/23/ekspansi-ke-pasar-afrika-pindad-jajaki-ekspor-alutsista-ke-ghana> pada 20 April 2020 pukul 18.17

Rolando Sihombing, "PKS Kembali Sentil Kunker Prabowo ke Luar Negeri" *Detik*, 30 Januari 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4878652/pks-kembali-sentil-kunker-prabowo-ke-luar-negeri> pada 20 April 2020 pukul 18.18.

"Prabowo Jalin Kerja Sama Pertahanan dengan Malaysia" *CNN Indonesia*, 24 Januari 2020. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200124154420-20->

468423/prabowo-jalin-kerja-sama-pertahanan-dengan-malaysia pada 21 April 2020 pukul 12.13.

Gita Irawan, "Prabowo dan Menhan Thailand Bahas Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Terorisme" *Tribun*, 18 November 2019. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/prabowo-dan-menhan-thailand-bahas-peningkatan-kerjasama-penanggulangan-terorisme> pada 21 April 2020 pukul 12.11

Tanti Yulianingsih, "Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Menhan Prabowo Bertandang ke Turki" *Liputan 6*, 30 November 2019. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/4123306/perkuat-kerja-sama-pertahanan-menhan-prabowo-bertandang-ke-turki> pada 21 April 2020 pukul 12.20

Yogi, "Menhan Prabowo Terbang ke China Bahas Peningkatan Kerja Sama Pertahanan" *Detik*, 16 Desember 2019. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4824052/menhan-prabowo-terbang-ke-china-bahas-peningkatan-kerja-sama-pertahanan> pada 21 April 2020 pukul 12.31

Sarah Gunawan, "Ke Jepang, Menhan Prabowo Tuntut Kerja Sama Yang Lebih Riil" *RMOL*, 22 Desember 2019. Diakses melalui <https://politik.rmol.id/read/2019/12/22/414512/ke-jepang-menhan-prabowo-tuntut-kerjasama-yang-lebih-riil> pada 21 April 2020 pukul 12.37

Tim Detikcom, "Prabowo Bertemu Menhan Prancis di Paris, Ini Isinya" *Detik*, 13 Januari 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4857873/prabowo-bertemu-menhan-prancis-di-paris-ini-isinya/2> pada 21 April 2020 pukul 12.46.

Tim Detikcom, "Prabowo Bertemu Menhan Rusia, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Teknik Militer" *Detik*, 29 Januari 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4878572/prabowo-bertemu-menhan-rusia-bahas-kerja-sama-pertahanan-teknik-militer/2> pada 21 April 2020 pukul 12.59.

Nibras Nailufar, "Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB" *Kompas*, 4 Maret 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/160000469/kontingen-garuda-dalam-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb> pada 20 April 2020 pukul 22.43

"Indonesia Bahas Kerja Sama Mitigasi Bencana ASEAN dan Jepang" *KSP*, 15 November 2018. Diakses melalui <http://ksp.go.id/indonesia-bahas-kerja-sama-mitigasi-bencana-asean-dan-jepang/> pada 20 April 2020 pukul 22.44.

“ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime” ASEAN. Diakses melalui https://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime pada 20 April 2020 pukul 22.49.

Alfurkon Setiawan, “Foreign Minister Release the Team of Humanitarian Mission of Indonesia to Nepal” *Setkab*, 30 April 2015. Diakses melalui <https://setkab.go.id/en/foreign-minister-release-the-team-of-humanitarian-mission-of-indonesia-to-nepal/> pada 20 April 2020 pukul 22.51.

Rachmat Fahzry, “Kunjungi Washington, Menhan Perkuat Kerja Sama RI-AS di Bidang Pertahanan” *Okezone*, 30 Agustus 2018. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2018/08/30/18/1943766/kunjungi-washington-menhan-perkuat-kerja-sama-ri-as-di-bidang-pertahanan> pada 21 April 2020 pukul 11.38.

Muhammad Iqbal, “Top! Modernisasi Pertahanan RI, Prabowo Terbang ke China” *CNBC Indonesia*, 16 Desember 2019. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191216113257-4-123330/top-modernisasi-pertahanan-ri-prabowo-terbang-ke-china> pada 21 April 2020 pukul 11.39.

Caesar Akbar, “Luhut Jajaki Kerja Sama Pertahanan dan Kereta Api dengan Afrika” *Tempo*, 21 Agustus 2019. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1238584/luhut-jajaki-kerja-sama-pertahanan-dan-kereta-api-dengan-afrika> pada 21 April 2020 pukul 11.57

“Indonesia-Australia Sepakati Kerjasama Keamanan Maritim” *Kemhan*, 6 Desember 2019. Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/2019/12/06/indonesia-australia-sepakati-kerjasama-keamanan-maritim.html> pada 21 April 2020 pukul 11.56.

Endri Kurniawati, “Menhan Prabowo Optimistis Kemandirian Alutsista dalam Negeri” *Tempo*, 3 Desember 2019. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1279495/menhan-prabowo-optimistis-kemandirian-alutsista-dalam-negeri> pada 21 April 2020 pukul 19.39

“Tugas dan Fungsi Dit Tekindhan” *Kemhan*. Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/poathan/tugas-dan-fungsi-dit-tekindhan> pada 21 April 2020 pukul 21.55

“Profil Puskersin TNI” *PPID TNI*, 30 Agustus 2016. Diakses melalui <https://ppid.tni.mil.id/view/32435636/profil-puskersin-tni.html> pada 21 April 2020 pukul 22.10.

Nur Azizah Rizki Astuti, “Dikritik PKS Sering Kunker, Prabowo Bicara Kebutuhan Keliling Dunia” *Detik*, 20 Januari 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4866480/dikritik-pks-sering-kunker-prabowo-bicara-kebutuhan-keliling-dunia> pada 21 April 2020 pukul 23.35.

Budiarti Putri, "Revisi UU TNI Masuk Prolegnas, Aktivis Desak Reformasi Militer" *Tempo*, 25 Januari 2020. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1299587/revisi-uu-tni-masuk-prolegnas-aktivis-desak-reformasi-militer> pada 22 April 2020 pukul 11.26

"Komisi I Dorong TNI-Kemenhan Modernisasi Alutsista Korps Marinir" *DPR*, 10 Desember 2019. Diakses melalui <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26876/t/Komisi+I+Dorong+TNI-Kemenhan+Modernisasi+Alutsista+Korps+Marinir> pada 22 April 2020 pukul 11.27.

"Kebijakan Modernisasi Alutsista Laut Berbasis MEF Tahap III" *PAL*, 30 Oktober 2019. Diakses melalui <http://pal.co.id/publikasi/artikel/1037> pada 22 April 2020 pukul 11.24

Dahnil Anzar Simajuntak, "Memperkuat Diplomasi Pertahanan" *Jawa Pos*, 3 Februari 2020. Diakses melalui <https://www.jawapos.com/opini/03/02/2020/memperkuat-diplomasi-pertahanan/> pada 22 April 2020 pukul 11.44.

Ilham, "Indonesia Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia" *Tempo*, 2 Desember 2011. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia/full&view=ok> pada 22 April 2020 pukul 12.01

Serafica Gischa, "Potensi Sumber Daya Maritim Indonesia" *Kompas*, 22 April 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/22/113659269/potensi-sumber-daya-maritim-indonesia> pada 22 April 2020 pukul 12.03.

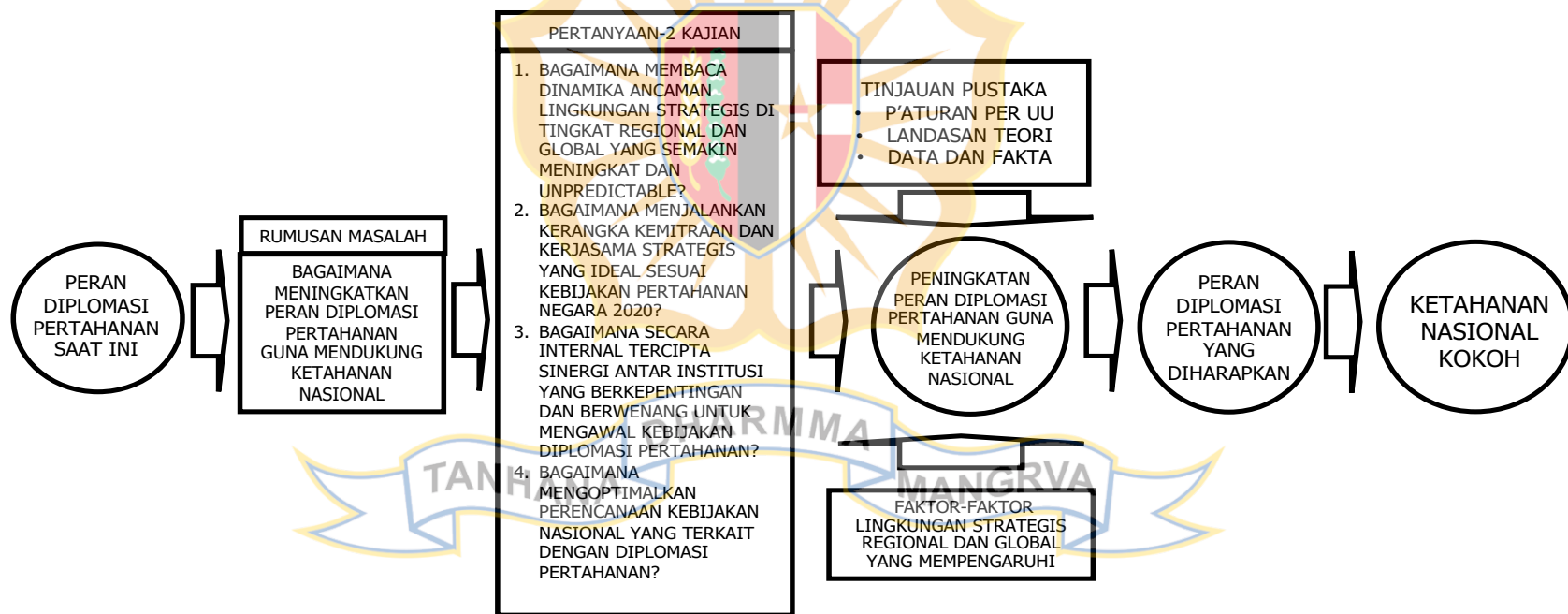
"Prabowo Heran Fraksi PDIP Minta Rincian Anggaran Kemenhan" *CNN Indonesia*, 11 November 2019. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191111135556-32-447300/prabowo-heran-fraksi-pdip-minta-rincian-anggaran-kemenhan> pada 22 April 2020 pukul 12.34.

"ASEAN Defence Ministers Meeting" *Sekretariat ASEAN*. Diakses melalui <http://setnas-asean.id/asean-defence-ministers-meeting-admm> pada 6 April 2020 pukul 22.56 WIB.

"Dukung" *KBBI*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/dukung> pada 19 Maret 2020 pukul 19.10.

ALUR PIKIR

PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN UNTUK Mendukung KETAHANAN NASIONAL



RIWAYAT HIDUP



Choirul Anam, S.E. dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 1 Oktober 1972. Saat ini penulis menjabat sebagai Paban Utama A-5 DIT A Bais TNI. Penulis dikaruniai 4 orang anak, dari seorang istri yang bernama Helmy Kurnia Ika Siswati. Penulis lulus dari Akademi Militer tahun 1994, lulus pendidikan Seskoal tahun 2008, lulus pendidikan Srata Satu Bidang Ekonomi tahun 2011, dan pada tahun 2020 Mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Lemhannas RI.

Pengalaman Penugasan, lulus Sussarcab Inf tahun 1994 langsung bertugas sebagai Danton Grup I Kopassus, kemudian menjabat Pa Intel Ops Den 521 tahun 1997. Pada tahun 1999 menjabat sebagai Pa Sandi Grup 5 Kopassus, dan Dantim Grup 5 Kopassus di tahun 2000. Tahun 2001 penulis menjabat sebagai Adc Panglima TNI, kemudian menjadi Paur Ops Sops Denma Mabes TNI di tahun 2002. Selanjutnya di tahun 2004 penulis menjabat sebagai Kasubdit Swakarsa Polhukam, tahun 2006 menjabat sebagai Kasubag Acara Protokol Polhukam. Tahun 2008 menjabat sebagai Danden Pamins Grup B Paspampres, di tahun 2009 diangkat sebagai Danden Pampri Grup B Paspamres. Pada tahun 2010 penulis menjabat sebagai Danden 3 Grup B Paspampres, tahun 2012 menduduki jabatan sebagai Pabandya D13 Dit D Bais TNI dan Pabandya D11 Dit D Bais TNI. Pada bulan Mei tahun 2013 penulis diangkat menjadi Kapen Kopassus dan bulan September 2013 menduduki jabatan sebagai Waaspers Danjen Kopassus. Tahun 2015 sampai dengan 2018 penulis menjabat sebagai Atase Pertahanan Republik Indonesia di Afrika Selatan, dan terakhir menjadi Paban Utama A-5 Dit A Bais TNI hingga sekarang.